



FF
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN LOA JANAN
TAHUN 2025-2029





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA JANAN

Jalan Soekarno Hatta Km.4 Telp. (0541) 7269219 Fax (0541) 7269211 Kode Pos 75391
Telepon (0541) 726912, E-mail : kec.loajanan.kukar@gmail.com

SURAT K E P U T U S A N

CAMAT LOA JANAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LOA JANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR:P. 001 /KEC.LJN/SK//1/2026

TENTANG

PERSONALIA PENYUSUNAN RENSTRA KECAMATAN 2025-2029
OPD KANTOR CAMAT LOA JANAN

CAMAT LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertibnya administrasi dan pengelolaan penyelenggaraan rutinitas kerja berjalan lancar, maka dipandang perlu untuk menetapkan Personalia Tim Penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan 2025-2029 pada Organisasi Perangkat Daerah KECAMATAN LOA JANAN Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 ;

b. Untuk maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dan diatur dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2020.

Memperhatikan: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Loa Janan Barat.

2. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. NOMOR 566/SK BUP/HK/2022 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2025;

3. Berdasarkan RKA dan DPA Belanja Satuan Perangkat Daerah KECAMATAN LOA JANAN Tahun Anggaran 202

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
 PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2026
 menetapkan Personalia Penyusunan Renstra
 Kecamatan 2025-2029 pada Organisasi
 Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan
 Kabupaten Kutai Kartanegara:

No.	Jabatan Dalam Satgas	NAMA/NIP	Jabatan Organik Pada SKPD
1	Penanggung Jawab	Drs. Hery Kusnadi NIP. 197212131992011001	Camat
2	Ketua	Minfiattin, S.I.P.,M.Si NIP. 197309011996032002	Sekcam
3	Sekretaris	Ipana Lestari, SP NIP. 198102012010012021	Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
4	Anggota Tim Kerja	Sari Endah Handayani, SSTP NIP. 198701182006022002	Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
5	Anggota Tim Kerja	Nazrul Halim, S.Sos NIP. 197312142008011006	Seksi Pemerintahan
6	Anggota Tim Kerja	Anwar, SST NIP. 196911081992031003	Seksi Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
7	Anggota Tim Kerja	Bun Yamin, SE.,M.Si NIP. 197808232010011006	Seksi Pembangunan
8	Anggota Tim Kerja	Didi Haryanto,SST NIP. 196905121994011002	Seksi Kesejahteraan Sosial
9	Anggota Tim Kerja	Minfiattin, S.I.P.,M.Si NIP. 197309011996032002	Plt. Seksi Pelayanan Umum
10	Anggota Tim Kerja	Padli NIP. 198302272010011020	Pengadministrasi Perkantoran

KEDUA : Personalia yang diangkat dalam jabatan tersebut dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada CAMAT LOA JANAN selaku atasan/pimpinan OPD KECAMATAN LOA JANAN Kabupaten Kutai Kartanegara ;

KETIGA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui DPA Organisasi Perangkat Daerah KECAMATAN LOA JANAN Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Loa Janan

Pada Tanggal: 2 Januari 2026

CAMAT LOA JANAN

Drs. Hery Rusnadi
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 197212131992011001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1.Bupati Kutai Kartanegara Kutai Kartanegara di Tenggarong
- 2.Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
- 3.Kepala Inspektorat Kutai Kartanegara di Tenggarong
- 4.Kepala BPKAD Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong
- 5.Yang bersangkutan di Tenggarong
- 6.Pertinggal

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Kecamatan Loa Janan ini berpedoman kepada Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Rencana Strategi Kecamatan Loa Janan pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Loa Janan ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara didalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Aamiin.

 Camat Loa Janan
Drs. Hery Rusnadi
Pembina Tk.I/Ivb
NIP. 197212131992011001

DAFTAR ISI

SURAT K E P U T U S A N.....	II
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	1
BAB I	4
PENDAHULUAN 4	
1.1. LATAR BELAKANG	4
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II	8
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
<i>Sumber : Kasi PEM Kecamatan Loa Janan tahun 2025.....</i>	<i>10</i>
2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah	10
Sumber:Bidang Umum,Ketetalaksanaan dan Kepegawaian Kec Loa Janan, Juni 2025.....	43
2.1.2 Kinerja Pelayanan Kecamatan Loa Janan	43
2.1.3 Kelompok Sasaran Pelayanan.....	65
2.1.4 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan	65
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	68
2.2.1 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	72
BAB III	88
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 88	
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Loa Janan.....	89
Sumber: hasil analisis, 2025.....	94
3.2 Strategi Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Loa Janan Tahun 2025-2029	95
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Loa Janan Tahun 2025-2029	99

BAB IV.....	102
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	102
4.1.1 PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB	
KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	124
BAB V.....	183
PENUTUP	183

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Luas Wilayah Kelurahan/Desa Dan Jumlah RT Kecamatan Loa Janan Tahun 2025.....	18
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Kecamatan Loa Janan Menurut Golongan Tahun 2025	42
Tabel 2.3	Data Pegawai Kecamatan Loa Janan menurut Kepangkatan 2025.....	43
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Kecamatan Loa Janan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025	44
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Kecamatan Loa Janan Yang Menduduki Jabatan Esselon Tahun 2025.....	45
Tabel 2.6	Data sarana dan prasarana Kecamatan Loa Janan Tahun 2025.....	45
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Loa Janan	54
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Loa Janan	67
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan Kecamatan.....	83
Tabel 2.10	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	96
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	108
Tabel 3.2	Strategi Renstra Kecamatan Loa Janan Tahun 2025-2029	111
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	113
Tabel 3.4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	115
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	121
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Loa Janan.....	139

Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	144
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Loa Janan.....	151

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Peta Wilayah Kecamatan Loa Janan.....	9
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Kecamatan Loa Janan.....	42
Gambar 3.1	Konsep Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	43
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kecamatan Loa Janan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan luas wilayah yang mencakup berbagai potensi sumber daya alam, seperti perkebunan, pertanian, dan kehutanan, serta keanekaragaman hayati yang tinggi, Loa Janan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan. Posisi geografisnya yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memberikan peluang dan tantangan baru yang memerlukan perencanaan strategis untuk menghadapi dinamika pembangunan pada periode 2025-2029.

Pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk Kecamatan Loa Janan akan memasuki periode baru yaitu tahun 2025-2029. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut perlu disusun dokumen perencanaan jangka menengah. Pasal 272 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode Tahun 2025-2029 pada tanggal 23 Juni 2025, menandai dimulainya

Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dilakukan secara simultan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, Sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, Kegiatan, dan Sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029. Tahapan penyusunan Renstra PD meliputi: Persiapan, penyusunan Rancangan Awal, penyusunan Rancangan, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir, dan Penetapan.

Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Perda RPJMD. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Loa Janan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Loa Janan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 136);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 No. 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;l

11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.7 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023-2042;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan kebijakan pembangunan Kecamatan Loa Janan dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 bagi para pemangku kepentingan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efisien dan efektif serta didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik good governance dan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Loa Janan Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Mengidentifikasi capaian kinerja Pembangunan Kecamatan Loa Janan
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis Kecamatan Loa Janan
3. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Loa Janan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan
4. Menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran

5. Menyediakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja target, dan pagu indikatif
6. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
7. Menjadi tolak ukur serta bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan Kecamatan Loa Janan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Loa Janan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
2. Sumber daya Perangkat Daerah;
3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya);
4. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

BAB 5 PENUTUP

- Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

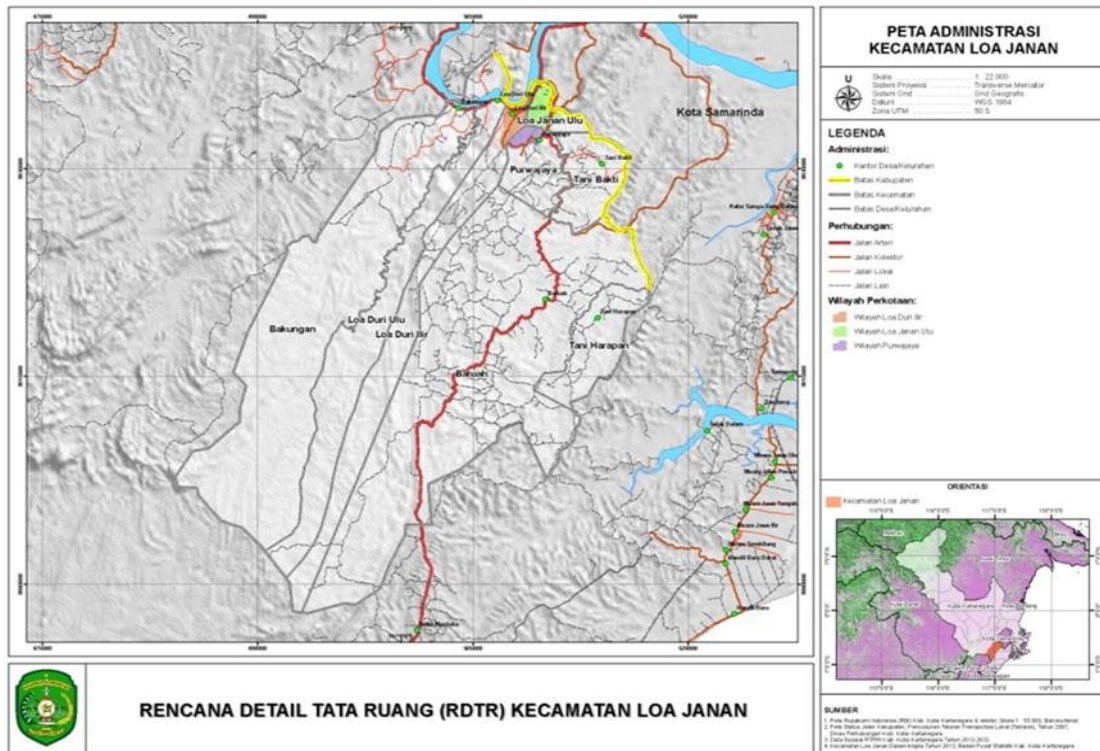
Kecamatan Loa Janan terletak di pesisir selatan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Wilayah ini berada sekitar 108 km dari Tenggarong, ibu kota kabupaten, dan 93 km dari Samarinda, ibu kota provinsi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi "Kecamatan Loa Janan Dalam Angka 2024", luas wilayah Kecamatan Loa Janan mencapai 1.045,90 km². Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020, Kecamatan Loa Janan telah dimekarkan menjadi dua wilayah: Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Loa Janan Barat. Setelah pemekaran, Kecamatan Loa Janan memiliki luas wilayah sekitar 284,93 km².

Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Kecamatan Loa Janan mencapai 67.471 jiwa pada tahun 2020. Wilayah ini terdiri dari 8 desa dan 1 desa persiapan pada tahun 2024, dengan total 199 Rukun Tetangga (RT) yang tersebar di 8 desa dan 1 desa persiapan. Kecamatan Loa Janan memiliki potensi sumber daya alam yang meliputi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta menjadi jalur transportasi penting bagi kegiatan ekonomi di wilayah pesisir

Batas- batas Wilayah Kecamatan Loa Janan

Sebelah Utara	: Kota samarinda
Sebelah Timur	: Kecamatan Samboja dan Kota Samarinda
Sebelah Selatan	: Kota Balikpapan
Sebelah Barat	: Kota samarinda

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kecamatan Loa Janan



Tabel 2.1

Data Luas Wilayah Desa Dan Jumlah RT

No	Nama Desa	Luas Wilayah Desa/ Kelurahan (Km2)	Jumlah RT
1	Bakungan	208,33	20
2	Batuah	67,06	49
3	Loa Duri Ilir	127,28	26
4	Loa Duri Ulu	127,28	18
5	Loa Duri Sebrang (DOB)		
6	Loa Janan Ulu	11,90	37
7	Purwajaya	35,55	21
8	Tani Bhakti	35,55	14
9	Tani Harapan	31,25	14
TOTAL		644,20	199

Sumber : Kasi PEM Kecamatan Loa Janan tahun 2025

2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Pada maka tugas pokoknya adalah Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi dari Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
10. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya
11. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan; pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan

12.Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta Lembaga
Kemasyarakatan

URAIAN TUGAS CAMAT:

- a) Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Kecamatan.
- b) Membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- c) Memberikan saran dan masukan kepada Bupati tentang langkah- langkah yang perlu diambil dalam bidang tugas umum pemerintahan.
- d) Merumuskan rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.
- e) Merumuskan penyusunan penetapan kinerja dan Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- f) Merumuskan kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan pada seksi pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.
- g) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- h) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- i) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan
- j) Mengkoordinasikan pemeliharaan parasarana dan fasilitas pelayanan umum
- k) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- l) Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan

- m) Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.
- n) Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, yang meliputi aspek-aspek Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan, Penyelenggaraan dan Kewenangan lain yang dilimpahkan mencakup penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- o) Merencanakan, Mengelola, Mengendalikan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- p) Melaksanakan Pengawasan, Pengendalian program dan Kegiatan ditingkat kecamatan.
- q) Menyusun dan Menyampaikan Laporan Tahunan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan penyelenggaraan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati serta pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati
- r) Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah sebagai bahan Informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- s) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan Instansi Teknis dan Organisasi lain yang menyangkut Bidang Tugas dan Tanggung Jawabnya
- t) Monitoring dan Evaluasi terhadap Rencana Strategik serta Kebijakan Operasional dibidang Tugas Umum Pemerintahan, yang meliputi urusan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan pelayanan Umum.

- u) Melaksanakan dan Melaporkan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat dibantu oleh:

- I. Sekretaris Camat mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam tupoksi sekretaris camat sbb:
 - a) Menyusun Rencana Kerja Sekertariat Kecamatan sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
 - b) Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas
 - c) Mengkonsultasikan kegiatan Sekertariat yang bersifat Urgen kepada Camat
 - d) Memberikan saran dan masukan kepada Camat tentang langkah- langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
 - e) Melaksanakan ketatausahaan, Tata Naskah Dinas, urusan kearsipan serta perpustakaan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f) Mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang Tugas Umum Pemerintahan, yang meliputi urusan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum.
 - g) Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) dan Penetapan Kinerja Kecamatan
 - h) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Pengisian Blanko Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

dan Laporan Pajak- Pajak Pribadi (LP2P) dilingkungan Kecamatan.

- i) Mengkoordinasikan laporan Rekapitulasi Daftar Hadir Bulanan Pegawai untuk disampaikan secara berkala ke BKD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bagian Organisasi Sekertariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- j) Menghimpun dan menyampaikan bahan-bahan laporan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.
- k) Menyiapkan bahan-bahan penyuluhan kepada instansi terkait dan masyarakat dibidang Dokumentasi dan Informasi.
- l) Melakukan Hubungan Kerja dan Koordinasi dengan unit lain yang terkait dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas.
- m) Menyiapkan Bahan Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana Kantor, Pembinaan Serta Pengembangan Pegawai.
- n) Menyelenggarakan proses Administrasi Perijinan Bidang Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati
- o) Mengkoordinasikan Sub-Sub Bagian yang melaksanakan Urusan Umum, Kerumahtanggaan, Keuangan dan Kepegawaian dilingkungan Kecamatan.
- p) Mengkoordinasikan Inventarisasi dan Mempersiapkan Urusan Penghapusan Barang
- q) Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas dan Menginventarisasi Permasalahan Sekertariat serta mencari alternatif pemecahannya.

- r) Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan
- s) Melaksanakan dan melaporkan Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Camat dibantu:

- I. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Memimpin, Membimbing, meneliti dan Menilai Hasil Kerja Bawahan
 - b) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Ketatalaksanaan sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas.
 - c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Sub Bagian Umum berdasarkan skala Prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
 - d) Mengkonsultasikan kegiatan Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Ketatalaksanaan yang bersifat Urgen kepada Sekretaris
 - e) Memberikan saran dan masukan kepada sekretaris tentang langkah- langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
 - f) Menyusun Rencana dan Program Kerja Tahunan Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Kepegawaian
 - g) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan layanan administrasi dalam lingkup Kecamatan
 - h) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan Kecamatan, meliputi ketertiban, keamanan, kebersihan, kehumasan dan protokol.

- i) Menyiapkan dan mengolah bahan-bahan laporan untuk penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap akhir tahun.
- j) Menyiapkan pelaksanaan pemusnahan arsip yang tidak berlaku.
- k) Meneliti dan memeriksa hasil pengetikan dan pengadaan.
- l) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan.
- m) Menyusun, mendistribusikan Rencana Kebutuhan Perlengkapan, Daftar Inventarisasi dan Perlengkapan Kantor.
- n) Memelihara Kebersihan Kantor dan rumah Jabatan Camat.
- o) Melaksanakan Urusan Pengadaan, Inventarisasi dan penghapusan Barang.
- p) Mengevaluasi pelaksanaan tugas menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Ketatalaksanaan serta mencari alternatif pemecahannya.
- q) Menghimpun dan menyerahkan seluruh salinan dokumen pengadaan barang dilingkungan kecamatan secara sistematis kepada kantor pengelolaan aset Daerah.
- r) Menyiapkan daftar hadir PNS dan menyusun laporan Rekapitulasi daftar hadir bulanan Pegawai untuk disampaikan secara berkala ke BKD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- s) Menghimpun bahan dan Data untuk perumusan kebijakan terkait dengan Urusan Kepegawaian dan Diklat.

- t) Menghimpun, mengusulkan kelengkapan Administrasi Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Kecamatan sesuai syarat yang ditentukan.
- u) Menghimpun, mengusulkan kelengkapan Administrasi Pembuatan Asuransi Kesehatan PNS, TASPEN dan TAPERUM
- v) Menghimpun, memproses Data dan mengusulkan permohonan cuti, pemberian penghargaan, pensiun, pemberian sanksi bagi PNS.
- w) Menyusun Daftar Urut Kependangkatan dan fasilitasi pembuatan DP3 PNS.
- x) Menyusun Daftar Penjagaan dan Mengusulkan Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala serta KP.4 Pegawai dilingkungan Kecamatan
- y) Menghimpun dan memfasilitasi pengisian Blanko Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran (LHKPN) dan Laporan Pajak-pajak pribadi (LP2P) dilingkungan Kecamatan.
- z) Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

II. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun Program dan Rencana Kerja Tahunan serta Rencana Anggaran dan Keuangan Tahunan sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas
- b) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan berdasarkan Skala Prioritas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

- c) Mengkolsutasikan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan yang bersifat urgen kepada sekretaris.
- d) Memberikan saran dan masukan kepada sekretaris tentang langkah- langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- e) Menyiapkan, mengelola bahan untuk pengambilan kebijakan dan penganggaran, penatausahaan, akutansi dan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan.
- f) Menyusun, mengusulkan dan menganalisis data dan dokumen penganggaran, penatausahaan, akutansi dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.
- g) Menyiapkan, mengelola bahan untuk sosialisasi petunjuk tekhnis dan bahan pembinaan kegiatan penganggaran, penatausahaan, akutansi dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.
- h) Memeriksa, meneliti penyiapan bahan pencairan anggaran oleh Bendaharawan/Pemegang Kas.
- i) Memeriksa, meneliti pelaksanaan pembukuan keuangan oleh bendaharawan/ pemegang kas.
- j) Memeriksa,meneliti penyiapan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh bendaharawan /pemegang kas.
- k) Menghimpun usulan RKA/DPA unit kerja internal Kecamatan sesuai dengan data yang adaberdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran.
- l) Melaksanakan verifikasi terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran Kecamatan.
- m) Menyiapkan, mengelola bahan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan.

- n) Membuat Laporan Keuangan Kecamatan.
- o) Melaksanakan dan Melaporkan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

III. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Memimpin, Membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b) Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada seksi pemerintahan berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- d) Mengkonsultasikan kegiatan seksi pemerintahan yang bersifat urgen kepada Camat melalui Sekretaris.
- e) Memberikan saran dan masukan kepada Camat melalui Sekertaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- f) Menyusun program kerja yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa/ Kelurahan, Pembinaan bidang Pertanahan dan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan.
- g) Mempersiapkan bahan pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
- h) Menyusun Rencana dan Program Kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan
- i) Mendata, Menghimpun dan mengelola data yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- j) Melaksanakan Administrasi Pertanahan yang menjadi urusan Kecamatan
- k) Menyiapkan Bahan dan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pemerintahan.

- l) Melaksanakan Pembinaan serta peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/ Kelurahan.
- m) Menyelenggarakan Administrasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil serta melakukan Pelaporan
- n) Menyelenggarakan Proses Administrasi, Perijinan Bidang Pendaftaran Kependudukan dan Pertanahan yang merupakan Pelimpahan kewenangan dari Bupati
- o) Memfasilitasi, menganalisis materi Peraturan Desa dan Keputusan Lurah yang disampaikan kepada Bupati.
- p) Menyiapkan bahan dan menyusun Monografi Kecamatan serta Pembinaan Monografi Desa/Kelurahan.
- q) Melaksanakan Pembinaan Administrasi dan Keuangan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan.
- r) Melaksanakan Pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan desa (BPD).
- s) Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- t) Memfasilitasi penataan maupun perselisihan batas Wilayah antar Desa/ Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan.
- u) Memfasilitasi Penyelesaian pengaduan masalah pertanahan.
- v) Memfasilitasi penyusunan laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepala Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan.
- w) Melaksanakan urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
- x) Menghimpun, Menyusun Data Kependudukan dan Catatan Sipil.

- y) Melaksanakan Pembinaan Kependudukan dan Catatan Sipil terhadap pemerintahan Desa/Kelurahan.
 - z) Melaksanakan dan melaporkan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- IV. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - b) Menyusun Rencana kerja dan Anggaran seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman melaksanakan tugas.
 - c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
 - d) Mengkonsultasikan kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bersifat Urgen kepada Camat melalui Sekretaris.
 - e) Memberikan Saran dan Masukan kepada Camat melalui Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.
 - f) Menyusun program kegiatan pembinaan perekonomian Masyarakat Desa/ Kelurahan, Perbankan, Perkreditan Rakyat, Perkoprasian, Peternakan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Industri Kecil, usaha Informal dan kehutanan serta peningkatan Produksi dan Distribusi hasil Produksi.
 - g) Memfasilitasi, Monitoring, Evaluasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan pembangunan Tingkat Desa / Kelurahan dan Kecamatan.
 - h) Mempersiapkan bahan urusan dalam bidang perindustrian dan Perdagangan, bidang bidang Pertanian, Bidang Kehutanan, bidang Lingkungan

Hidup, bidang Perkoprasian, bidang Pertambangan dan Energi, Pembinaan Lingkungan Hidup.

- i) Memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan peran serta, prakarsa dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat.
- j) Melaksanakan Pengumpulan dan pelaporan Data Kegiatan usaha Industri kecil, sumber Daya Alam dan sumber Daya manusia sektor Industri.
- k) Melaksanakan pengumpulan, Koordinasi dan Pelaporan data bidang pertanian.
- l) Melakukan koordinasi, Bimbingan dan pemantauan terhadap ketahanan pangan diwilayah Kecamatan, pengembangan Kelompok Tani dan kelembagaan Ekonomi Petani, Kelembagaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif.
- m) Monitoring, melaporkan perkembangan harga sembilan bahan pokok
- n) Mengkoordinasikan pembinaan, pemantauan dan perlindungan terhadap koperasi, usaha perkebunan dan Peternakan.
- o) Melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata.
- p) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data profil Kecamatan dan Desa, data kegiatan Pembangunan Desa / Kelurahan dan Kecamatan.
- q) Menyelenggarakan proses Administrasi Perizinan bidang Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan, Pariwisata, Pertambangan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- r) Melaksanakan Pengumpulan dan Pelaporan data Perumahan, bangunan gedung dan drainase lingkungan.

- s) Melaksanakan pengendalian pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan.
- t) Melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan lokasi daur ulang sampah (LDUS) dan air bersih Pedesaan.
- u) Melaksanakan koordinasi dan Sosialisasi rencana tata ruang.
- v) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan Data sumber pencemaran lingkungan hidup, sumber Daya Alam dan sumber daya buatan, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan lingkungan hidup.
- w) Melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penghijauan, rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air.
- x) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data penambangan sumber daya mineral dan energi dan pengambilan air bawah tanah.
- y) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

V. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b) Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi ketentraman, ketertiban umum dan linmas sebagai pedoman melaksanakan tugas.
- c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada seksi ketentraman, ketertiban umum dan linmas berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

- d) Mengkonsultasikan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban umum dan linmas yang bersifat urgen kepada camat melalui sekretaris.
- e) Memberikan saran dan masukan kepada camat melalui sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- f) Mempersiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta tertib perijinan.
- g) Mempersiapkan bahan serta penyelenggaraan pembinaan aparat penertiban, Polisi Pamong Praja, Linmas Kecamatan dan Linmas Desa/ kelurahan
- h) Menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa, potensi perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
- i) Menghimpun, menyusun serta mengolah data, melakukan koordinasi dengan unit lain terkait yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.
- j) Mengatur penyelenggaraan operasional ketentraman dan ketertiban.
- k) Penegakan, pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- l) Menyiapkan bahan pembinaan dalam langkah pembauran Kesatuan Bangsa.
- m) Melaksanakan identifikasi potensi masalah ketentraman dan ketertiban serta upaya pencegahan.
- n) Memproses Administrasi, rekomendasi dan perijinan bidang politik dalam negeri dan Administrasi publik yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- o) Menginventarisasi, menyusun dan melaporkan data bidang ketentraman dan ketertiban serta Linmas.

- p) Melakukan upaya preventif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- q) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan, kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat tingkat kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang.
- r) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data WNI ketrurunan dan WNA.
- s) Mempersiapkan bahan dan penyelenggaraan pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan ummat beragama.
- t) Melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- u) Melakukan Pencegahan atas pengelolaan sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.
- v) Melakukan pencegahan dan penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, Zat adiktif dan bahan berbahaya.
- w) Melakukan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah.
- x) Melakukan pengawasan dan pengendalian wilayah yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban.
- y) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas Sebagai berikut:

- a) Memimpin, Membimbing, Meneliti dan menilai hasil Kerja Bawahan.
- b) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas.
- c) Menyusun Sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan Skala Prioritas sebagai Pedoman dalam Melaksanakan Tugas.
- d) Mengkonsultasikan Kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial yang bersifat Urgen kepada Camat melalui Sekertaris.
- e) Memberikan Saran dan Masukan kepada Camat melalui sekertaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan tugasnya.
- f) Mempersiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan serta bantuan sosial, Kepemudaan, Peranan Wanita dan Olah Raga, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- g) Mempersiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
- h) Menghimpun, menyusun dan mengolah data, menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan bidang kesejahteraan sosial.
- i) Melaksanakan urusan bidang kesenian, kebudayaan, pendidikan, kepemudaan, olah raga, peranan wanita, dan kehidupan beragama.
- j) Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/ kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemberdayaan lembaga Adat.
- k) Menyelenggarakan proses administrasi perizinan bidang ketenaga kerjaan dan pendidikan luar sekolah,

pemuda dan oleh raga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati

- l) Melaksanakan koordinasi program keluarga berencana (KB).
- m) Menghimpun dan menyusun data bantuan sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan.
- n) Menyiapkan bahan pembinaan bagi penderita cacat, tuna karya, tuna wisma, tuna rungu, tuna susila dan panti asuhan.
- o) Menyiapkan bahan dan data untuk pengajuan permintaan bantuan bagi korban bencana serta pendistribusiannya.
- p) Menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan.
- q) Menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkoba dan penyandang masalah sosial.
- r) Menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan keperamukaan, karang taruna, organisasi kepemudaaan dan keolahragaan.
- s) Menyiapkan bahan pembinaan serta sosialisasi kesejahteraan keluarga peranan wanita dan organisasi kewanitaan.
- t) Melaksanakan pendataan mengenai angkatan tenaga kerja sebagai bahan pembinaan tenaga kerja.
- u) Melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan penataan penduduk.
- v) Menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah, maupun luar sekolah dan pendataan sarana dan prasarana pendidikan.

- w) Melaksanakan koordinasi pemberantasan wabah penyakit, imunisasi balita dan anak sekolah.
- x) Melaksanakan koordinasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi, kegiatan posyandu.
- y) Menghimpun, menyiapkan bahan, mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana peribadatan dan krehidupan beragama.
- z) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan

VII. Kepala Seksi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut:

- a) Memimpin, membimbing, meneliti hasil kerja bawahan.
- b) Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Pelayanan Umum berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- d) Mengkonsultasikan kegiatan seksi pelayanan umum yang bersifat urgen kepada camat melalui sekretaris.
- e) Memberikan saran dan masukan kepada camat melalui sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- f) Menyusun rencana dan pogram seksi pelayanan umum sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kekayaan, inventarisasi desa/ kelurahan, kebersihan, sarana dan prasarana umum.
- g) Menyusun rencana kerja, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan perizinan.
- h) Menginventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah dilingkup kecamatan.

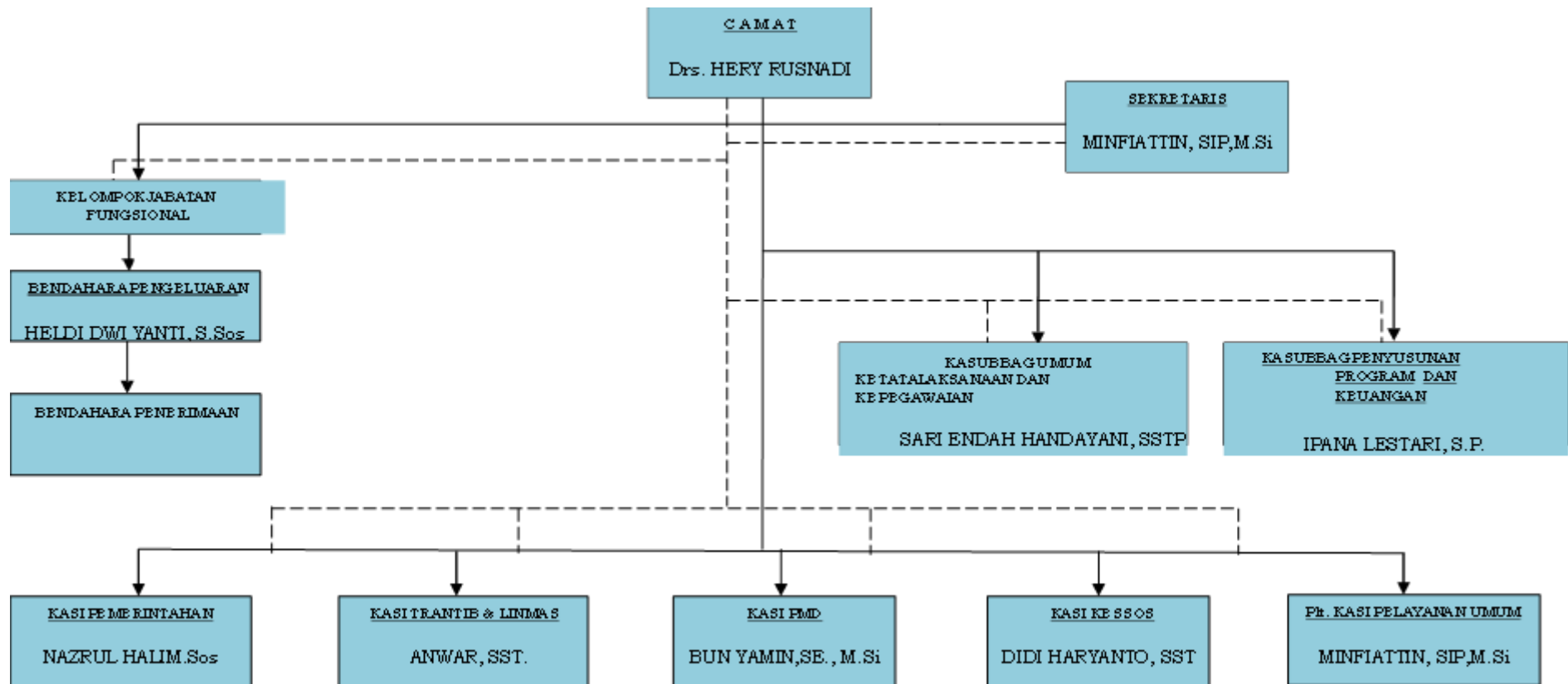
- i) Menyelenggarakan proses administrasi perizinan bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- j) Melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman.
- k) Menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan Desa/ Kelurahan.
- l) Menghimpun dan mengolah data potensi wilayah sebagai bahan perencanaan dan pengembangan wilayah kecamatan.
- m) Meneliti dan melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan perizinan serta menetapkan besaran retribusi.
- n) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- o) Menginventarisasi kantor, rumah dinas, balai desa dan bangunan milik pemerintah lainnya.
- p) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa.
- q) Mengkoordinasikan pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah.
- r) Menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan.
- s) Menghimpun, mengolah data, dan membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum.
- t) Melaksanakan sosialisasi dan pengendalian perizinan perumahan dan bangunan
- u) Melakukan pemantauan terhadap pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan, drainase pedesaan dan pemukiman.

- v) Melaksanakan pengendalian pemanfaatan daerah milik jalan dan saluran drainase, daerah milik irigasi dan sumber daya air
- w) Melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan pembangunan jaringan jalan, jembatan dan drainase.
- x) Mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu penerangan jalan umum.
- y) Melaksanakan pemantauan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi desa, jaringan tersier dan jaringan irigasi sumur pompa.
- z) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Susunan organisasi Kecamatan Loa Janan mengacu pada peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi,Tugas,Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat Camat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum,Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c.Seksi Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- f. Seksi Pelayanan umum.
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat.
- h. Kelurahan membawahkan:
 - 1) Sekretaris.
 - 2) Seksi Pemerintahan.
 - 3) Seksi Pembangunan.
 - 4) Seksi Sosial

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kecamatan Loa Janan
STUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LOA JANAN
(Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 69 Tahun 2016)



Sumber : Bagian Umum, Krtatalaksana dan Kepegawaian Kecamatan Loa Janan, 2025

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara mutlak diperlukan ketersediaan sumber daya Pembangunan yang memadai. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumber daya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal. Kondisi ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur yang dimiliki Kecamatan Loa Janan Kutai Kartanegara pada tahun 2025 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia Kecamatan Loa Janan Menurut Golongan

Komposisi Pegawai secara keseluruhan jumlah Aparatur Sipil Negara Kecamatan Loa Janan sampai Juli Tahun 2025 setelah Pengurangan Kecamatan Loa Janan adalah sebanyak 40 orang, sebanyak 40 itu terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kecamatan Loa Janan adalah sebagaimana ditunjukkan table2.2 dan tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel.2.2 Jumlah Pegawai ASN Kecamatan Loa Janan Menurut Golongan pada bulan Juli Tahun 2025

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	I	1	0	1	3,45%
2	II	6	1	7	24,14%
3	III	7	11	18	62,07%
4	IV	2	1	3	10,34%
	Jumlah	16	13	29	100%

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan Loa Janan Tahun 2025

**Tabel.2.3 Jumlah Pegawai P3K Kecamatan Loa Janan
Menurut Golongan pada bulan Juli Tahun 2025**

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	I	1	0	1	00,00%
2	II	10	14	24	64,64%
3	III	4	2	6	36,36%
4	IV	0	0	0	00,00%
	Jumlah	15	16	31	100%

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan Loa Janan, November Tahun 2025

Pada tahun 2025, Jumlah Aparatur Sipil Negara dan P3K di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 31 pria dan 29 wanita dengan dominasi pegawai di Golongan II sebanyak 31 orang.

- b. Sumber Daya Manusia Kecamatan Loa Janan Menurut Kepangkatan Data Pegawai Pada Kecamatan Loa Janan Berdasarkan Kepangkatan Kepegawaian Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.4
Data ASN dan P3K
Kecamatan Loa Janan menurut Kepangkatan**

PANGKAT	GOL. RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	1	2	3	4
Juru Muda	I/a	0	0	0
Juru Muda Tk.I	I/b	0	0	0
Juru	I/c	0	0	0
Juru Tk.I	I/d	1	0	1
PPPK		1	0	1
Jumlah Gol.I		2	0	2
Pengatur Muda	II/a	0	0	0
Pengatur Muda Tk.I	II/b	0	0	0
Pengatur	II/c	1	0	1

PANGKAT	GOL. RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	1	2	3	4
Pengatur Tk.I	II/d	6	1	7
PPPK		10	14	24
Jumlah Gol. II		17	15	32
Penata Muda	III/a	0	1	1
Penata Muda Tk.I	III/b	1	5	6
Penata	III/c	2	1	3
Penata Tk.I	III/d	4	4	8
PPPK		4	2	6
Jumlah Gol. III		11	13	24
Pembina	IV/a	1	1	2
Pembina Tk.I	IV/b	1	0	1
Pembina Utama Muda	IV/c	0	0	0
Pembina Utama Madya	IV/d	0	0	0
Pembina Utama	IV/e	0	0	0
PPPK				
Jumlah Gol. IV		2	1	3
TOTAL		31	29	60

Sumber: Bagian Kepegawaian Kecamatan Loa Janan, Tahun 2025

Menurut kepangkatan, Pegawai Negeri Sipil dan P3K di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara di dominasi pangkat Pengatur sejumlah 31 orang.

c. Sumber Daya Manusia Kecamatan Loa Janan Menurut Tingkat Pendidikan

Pada Tahun 2025 tercatat jumlah Pegawai lingkup Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Pendidikan didominasi oleh Tingkat Pendidikan SMA/SEDERAJAT .

Adapun jumlah dan komposisi menurut Kepangkatan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel.2.5 Jumlah Pegawai Kecamatan Loa Janan
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

PENDIDIKAN	PEGAWAI				JUMLAH
	ASN		P3K		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5	6
SD / SEDERAJAT	0	0	1	0	1
SMP / SEDERAJAT	1	0	0	0	1
SMA / SEDERAJAT	6	2	10	14	32
DIPLOMA I	0	0	0	0	0
DIPLOMA II	0	0	0	0	0
DIPLOMA III	0	1	0	0	1
DIPLOMA IV	0	1	0	0	1
SARJANA (S1)	5	9	4	2	20
PROFESI	0	0	0	0	0
PASCA SARJANA (S2)	1	2	0	0	3
DOKTOR (S3)	1	0	0	0	1
SMP Kejuruan	0	0	0	0	0
SMA Kejuruan	0	0	0	0	0
SMA Keguruan	0	0	0	0	0
TOTAL	14	15	15	16	60

Sumber: Bagian Kepegawaian Kecamatan Loa Janan, Tahun 2025

Menurut tingkat pendidikan pegawai di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara di dominasi tingkat pendidikan SMA/SEDERAJAT dengan jumlah 32 orang.

- d. Sumber Daya Manusia Kecamatan Loa Janan yang Menduduki Jabatan Eselon Tahun 2025.

Pada Tahun 2025 tercatat jumlah Pegawai lingkup Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Jabatan Eselon didominasi oleh Eselon IV. Total Pegawai yang menduduki jabatan eselon adalah 8 orang, Pegawai dengan jabatan eselon III berjumlah 2 orang, sementara jabatan eselon IV berjumlah 6 orang. Dan di

Kecamatan Loa Janan terdapat 1 Jabatan Esselon yang belum terisi sampai dengan saat ini yaitu Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Kecamatan Loa Janan
Yang Menduduki Jabatan Esselon Tahun 2025

No.	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	II.a	0	0	0	0,00%
2	II.b	0	0	0	0,00%
3	III.a	1	0	1	12,50%
4	III.b	0	1	1	12,50%
5	IV.a	4	0	4	50,00%
6	IV.b	0	2	2	25,00%
Jumlah		5	3	8	100%

Sumber: Bagian Kepegawaian Kecamatan Loa Janan, Juni 2025

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu penunjang utama dalam upaya meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Sarana dan Prasarana ini digunakan antara lain:

- Menunjang perkantoran; kegiatan ketatausahaan/administrasi
- Menunjang peningkatan kualitas SDM Aparat;
- Menunjang kegiatan Rapat/ Konsultasi/ Fasilitasi/ Sosialisasi.

Dengan terus berkembangnya IPTEK dan modernisasi zaman, maka penambahan, penggantian, dan penyesuaian sarana dan prasarana tetap saja diperlukan demi menunjang pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Sarana dan Prasarana kerja Kecamatan Loa Janan sudah memadai namun ada beberapa sarana dan prasaran yang belum menunjang pada bidang masing-masing. Berikut adalah jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara:

Tabel 2.7
Data sarana dan prasarana Kecamatan Loa Janan

NO.	NO. BARANG	NAMA KEGIATAN	KON DISI	JUM LAH	KET
		TANAH			
1	1.3.5.01.001.001.012	Tanah	Baik	24	
		PERALATAN DAN MESIN			
1	1.3.2.03.001.003.033	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	Baik	2	
2	1.3.2.04.001.007.003	Alat Penggiling Padi	Baik	1	
3	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	Baik	209	
4	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Baik	61	
5	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Baik	55	
6	1.3.2.06.001.001.096	peralatan studio audio lainnya (dst)	Baik	7	
7	1.3.2.06.002.001.022	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	Baik	1	
8	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	Baik	30	
9	1.3.2.05.001.005.076	Papan Nama Instansi	Baik	1	
10	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	Baik	2	
11	1.3.2.01.001.001.009	tractor lainnya (dst)	Baik	1	
12	1.3.2.02.001.003.001	Truck + Attachment	Baik	3	
13	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Baik	262	
14	1.3.2.04.001.010.001	Alat Pengolahan lainnya	Baik	1	
15	1.3.2.05.001.001.012	mesin ketik lainnya (dst)	Baik	2	
16	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	Baik	1	
17	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	Baik	8	
18	1.3.2.05.002.006.023	Tustel	Baik	1	
19	1.3.2.06.001.002.042	Rak Peralatan	Baik	1	
20	1.3.2.08.001.040.017	Beater Unit (Mesin Penggiling)	Baik	1	
22	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	Baik	25	
23	1.3.2.05.001.004.004	Rak Kayu	Baik	1	
24	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	Baik	1	
25	1.3.2.05.002.006.048	Handy Cam	Baik	1	
26	1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	Baik	5	
27	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	95	
28	1.3.2.10.002.003.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	Baik	1	
29	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Baik	51	
30	1.3.2.15.003.002.005	Tenda	Baik	8	
31	1.3.2.03.003.009.018	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	Baik	2	
32	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	Baik	9	
33	1.3.2.05.001.002.012	Mesin Penghitung Uang	Baik	1	
34	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	Baik	11	
35	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	Baik	11	
36	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	Baik	3	
37	1.3.2.10.001.001.008	Komputer Jaringan lainnya	Baik	4	
38	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	Baik	4	
39	1.3.2.05.003.003.009	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Baik	29	
40	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	Baik	3	

NO.	NO. BARANG	NAMA KEGIATAN	KON DISI	JUM LAH	KET
41	1.3.2.05.003.004.005	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	Baik	16	
42	1.3.2.05.003.007.009	Buffet Kaca	Baik	1	
43	1.3.2.05.001.005.012	Mesin Absensi	Baik	1	
44	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	Baik	4	
45	1.3.2.05.002.001.014	Meja Resepsionis	Baik	1	
46	1.3.2.05.002.001.027	Meja Makan Besi	Baik	1	
47	1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	Baik	86	
48	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	Baik	13	
49	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	Baik	52	
50	1.3.2.10.002.003.002	Monitor	Baik	1	
51	1.3.2.05.003.001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Baik	9	
52	1.3.2.05.002.006.018	Unit Power Supply	Baik	1	
53	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	Baik	13	
54	1.3.2.02.001.004.006	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	Baik	3	
55	1.3.2.02.001.009.001	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	Baik	1	
56	1.3.2.05.002.001.025	Kasur/Spring Bed	Baik	8	
57	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	Baik	20	
58	1.3.2.05.002.005.002	Kompas Gas (Alat Dapur)	Baik	1	
59	1.3.2.05.002.005.026	Alat Dapur lainnya	Baik	1	
60	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	Baik	3	
61	1.3.2.02.001.001.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	Baik	7	
62	1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	Baik	5	
63	1.3.2.05.002.005.026	Alat Dapur lainnya	Baik	3	
64	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	Baik	7	
65	1.3.2.05.002.006.014	Microphone	Baik	2	
66	1.3.2.05.002.006.059	Gordyir/Kray	Baik	16	
67	1.3.2.06.003.010.006	peralatan antena shf/parabola lainnya (dst)	Baik	1	
68	1.3.2.08.001.013.081	TV Monitor	Baik	2	
69	1.3.2.02.001.006.022	Truck Sampah	Baik	1	
70	1.3.2.03.001.006.012	Gergaji Chain Saw	Baik	1	
71	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	Baik	21	
72	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	Baik	73	
73	1.3.2.05.001.004.007	Brandkas	Baik	1	
74	1.3.2.05.001.005.043	LCD Projector/Infocus	Baik	18	
75	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	Baik	4	
76	1.3.2.05.002.004.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Baik	5	
77	1.3.2.05.002.007.001	Alat Pemadam/Portable	Baik	1	
78	1.3.2.05.003.001.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Baik	1	
79	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Baik	2	
80	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Baik	29	
81	1.3.2.10.002.002.009	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Baik	1	
82	1.3.2.03.003.001.072	Global Positioning System	Baik	5	
83	1.3.2.05.003.007.010	Lemari Arsip Pejabat lainnya	Baik	18	

NO.	NO. BARANG	NAMA KEGIATAN	KON DISI	JUM LAH	KET
84	1.3.2.06.003.047.002	Genset	Baik	1	
85	1.3.2.05.002.006.036	Tangga Aluminium	Baik	3	
86	1.3.2.01.003.004.002	Portable Generating Set	Baik	1	
87	1.3.2.01.003.005.010	Pompa Air	Baik	5	
88	1.3.2.02.001.001.004	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Baik	1	
89	1.3.2.02.001.001.004	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Baik	1	
90	1.3.2.02.001.003.007	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	Baik	9	
91	1.3.2.02.001.006.001	Mobil Ambulance	Baik	2	
92	1.3.2.05.001.003.009	Mesin Fotocopy Electronic	Baik	1	
93	1.3.2.05.001.004.020	Lemari Display	Baik	1	
94	1.3.2.05.001.004.027	Lemari Kaca	Baik	3	
95	1.3.2.05.001.005.002	CCTV - Camera Control Television System	Baik	12	
96	1.3.2.05.001.005.053	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Baik	2	
97	1.3.2.05.002.005.011	Treng Air/Tandon Air	Baik	7	
98	1.3.2.05.002.006.007	Loudspeaker	Baik	2	
99	1.3.2.05.002.006.039	Mimbar/Podium	Baik	2	
100	1.3.2.05.002.006.068	Tangga	Baik	2	
101	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Baik	16	
102	1.3.2.05.003.006.013	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat lainnya	Baik	5	
103	1.3.2.06.001.001.001	Audio Mixing Console	Baik	2	
104	1.3.2.06.001.001.036	Microphone/Wireless MIC	Baik	2	
105	1.3.2.06.001.002.126	Camera Digital	Baik	1	
106	1.3.2.11.001.003.001	alat eksplorasi topografi lainnya lainnya (dst)	Baik	1	
107	1.3.2.15.003.001.021	Tandu	Baik	2	
109	1.3.2.05.003.002.014	Meja Rapat Pejabat lainnya	Baik	3	
110	1.3.2.01.001.010.018	alat pengangkat lainnya (dst)	Baik	2	
111	1.3.2.05.002.007.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	Baik	2	
112	1.3.2.08.002.005.017	Smoke Detecting System & Alarm	Baik	1	
113	1.3.2.15.004.004.008	Fire Alarm System	Baik	1	
114	1.3.2.05.002.006.074	Bracket Standing Peralatan	Baik	1	
		BANGUNAN DAN GEDUNG			
1	1.3.3.01.001.009.001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	3	
2	1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	7	
3	1.3.3.01.001.001.005	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	30	
4	1.3.3.01.001.006.015	Bangunan Posyandu	Baik	1	
5	1.3.3.01.001.008.004	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	Baik	1	
6	1.3.3.01.001.030.005	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	2	
7	1.3.3.01.001.012.004	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	Baik	1	
8	1.3.3.01.002.008.003	Flat/rumah Lain-lain (dst)	Baik	1	

NO.	NO. BARANG	NAMA KEGIATAN	KON DISI	JUM LAH	KET
9	1.3.3.01.001.002.014	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	3	
10	1.3.3.02.001.004.001	Monomen/Bangunan Bersejarah Lainnya	Baik	2	
11	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	4	
12	1.3.3.01.002.002.001	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Baik	2	
13	1.3.3.01.001.011.001	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	Baik	1	
14	1.3.3.01.001.023.002	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Semi Permanen	Baik	1	
15	1.3.3.01.001.004.006	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Baik	1	
16	1.3.3.01.001.007.004	Bangunan Oceanarium Lain-lain (dst)	Baik	1	
17	1.3.3.01.002.003.016	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	Baik	1	
18	1.3.3.01.001.013.010	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	Baik	1	
19	1.3.3.01.001.013.001	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	1	
20	1.3.3.02.001.002.002	Tugu Pembangunan	Baik	1	
21	1.3.3.04.001.004.001	Pagar Permanen	Baik	5	
22	1.3.3.02.001.002.003	Tugu Peringatan Lainnya	Baik	1	
23	1.3.3.01.001.011.008	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	Baik	1	
24	1.3.3.01.001.009.007	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	Baik	2	
25	1.3.3.01.001.032.001	Bangunan Tempat Parkir	Baik	1	
26	1.3.3.01.001.037.001	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	1	
27	1.3.3.01.001.032.005	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Baik	4	
28	1.3.3.01.001.033.007	Bangunan Parkir lainnya (dst)	Baik	1	
29	1.3.3.01.001.033.001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	3	
		JALAN JEMBATAN DAN IRIGASI			
1	1.3.4.01.001.005.002	Jalan Desa Lain-lain	Baik	372	
2	1.3.4.01.002.010.001	Jembatan Penyeberangan Orang	Baik	3	
3	1.3.4.02.001.005.003	Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain	Baik	65	
4	1.3.4.04.001.004.004	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	Baik	2	
5	1.3.4.04.002.001.004	Jaringan Transmisi Lain-lain	Baik	6	
6	1.3.4.02.001.006.016	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Irigasi)	Baik	2	
7	1.3.4.02.001.006.017	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	Baik	8	
8	1.3.4.03.001.005.006	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Lain-lain (dst)	Baik	1	
9	1.3.4.04.003.001.004	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	Baik	1	
10	1.3.4.01.002.010.006	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	Baik	6	

NO.	NO. BARANG	NAMA KEGIATAN	KON DISI	JUM LAH	KET
11	1.3.4.02.001.001.006	Bangunan Waduk a Lain-lain	Baik	1	
12	1.3.4.02.002.001.001	Waduk Pasang Surut	Baik	1	
13	1.3.4.02.002.004.005	Bangunan Saluran lain-lain	Baik	2	
14	1.3.4.04.001.001.004	Jaringan Pembawa Lain-lain	Baik	6	
15	1.3.4.01.002.009.008	Jembatan Khusus Lain-lain	Baik	4	
16	1.3.4.04.001.002.004	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	Baik	1	
17	1.3.4.04.001.003.004	Jaringan Cabang Distribusi lain-lain	Baik	1	
18	1.3.4.04.002.002.004	Jaringan Distribusi Lain-lain	Baik	2	
19	1.3.4.02.006.006.001	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Baik	1	
20	1.3.4.01.001.005.001	Jalan Desa	Baik	175	
21	1.3.4.01.002.005.001	Jembatan Pada Jalan Desa	Baik	28	
22	1.3.4.01.002.005.002	Jembatan Desa Lain-lain	Baik	82	
23	1.3.4.02.007.003.004	Saluran Pembuang Air Buangan Air Pertanian	Baik	10	
24	1.3.4.02.006.001.003	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	Baik	1	
25	1.3.4.02.006.002.008	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	Baik	3	
26	1.3.4.02.006.003.003	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	Baik	1	
27	1.3.4.02.007.001.005	Bangunan Pembawa Air KOTOR Lain-lain	Baik	43	
28	1.3.4.03.002.001.004	Instalasi Air Kotor Lain-lain	Baik	5	
29	1.3.4.03.002.003.004	Instalasi Air Buangan Pertanian Lain-lain	Baik	14	
30	1.3.4.03.004.002.007	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lain-lain	Baik	1	
31	1.3.4.02.007.004.005	Bangunan Pengamanan Air Kotor Lain-lain	Baik	85	
32	1.3.4.02.005.002.001	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	Baik	1	
33	1.3.4.02.004.004.003	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Lain-lain	Baik	1	
34	1.3.4.02.007.005.006	Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah	Baik	8	
35	1.3.4.02.001.003.008	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	Baik	1	
36	1.3.4.02.004.005.007	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	Baik	1	
37	1.3.4.02.005.005.005	Bangunan Pengaman Pengembangan Lain-lain	Baik	1	
38	1.3.4.02.007.001.001	Saluran Pengumpul Air Hujan	Baik	4	
39	1.3.4.02.002.005.001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Pasang Surut)	Baik	1	
40	1.3.4.02.004.004.002	Saluran Drainage	Baik	29	
41	1.3.4.02.007.003.005	Bangunan Pembuang Air Kotor Lain-lain (dst)	Baik	39	
42	1.3.4.02.007.006.001	Bangunan air kotor lainnya	Baik	45	
43	1.3.4.01.002.013.001	Jembatan lainnya	Baik	1	

NO.	NO. BARANG	NAMA KEGIATAN	KON DISI	JUM LAH	KET
44	1.3.4.02.001.004.004	bangunan pembuang irigasi lainnya (dst)	Baik	6	
45	1.3.4.02.001.008.001	Bangunan air irigasi lainnya	Baik	7	
46	1.3.4.02.004.005.012	Bangunan Pemecah Gelombang	Baik	1	
		ASET TETAP LAINNYA			
1	1.3.5.01.001.001.012	Buku Umum Lain-lain	Baik	1	
2	1.3.5.02.001.001.003	Alat Kesenian Lain-lain	Baik	1	
3	1.3.5.05.001.001.001	Tanaman Keras	Baik	3	
4	1.3.5.07.001.001.007	Aset Renovasi	Baik	5	

Sumber: Bidang Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Kec Loa Janan, Juni 2025

2.1.2 Kinerja Pelayanan Kecamatan Loa Janan

Kecamatan Loa Janan menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada Masyarakat.

Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa, Kelurahan karena keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Loa Janan berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2021-2026 menurut indikator kinerja Pelayanan SKPD tahun 2024 yaitu Sangat Baik yaitu sebesar 89,45 dan atau indikator lainnya disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Kecamatan Loa Janan

Indikator Kinerja	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Indikator Tujuan															
Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	80	83	83	90	90	85,83	90,12	89,45	n/a	n/a	107,29	108,58	107,77	-	-
Indikator Sasaran															
Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	80	83	83	90	90	100	100	100	n/a	n/a	125	120	120,48	-	-
Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	75	75	75	75	75	100	100	100	n/a	n/a	133,3	133,3	133,3	-	-
Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	75	75	75	75	75	-49,00	82,61	18,79	n/a	n/a	-65,33	110,147	25,05	-	-
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	100	100	100	100	100	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-
Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan															
Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	75	75	75	75	100	100	100	100	n/a	n/a	133,3	133,3	133,3	-	-
Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	-	-

Indikator Kinerja	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	-	-	-	5	3	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	2	2	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	3	1	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-
Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	-	1	-	1	2	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-
Jumlah kegiatan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	-	1	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	1	2	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-
Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	150	150	150	150	150	150	390	608	n/a	n/a	100	260	405,33	-	-
Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	3	404	14	12	12	400	404	14	n/a	n/a	100	100	100	-	-

Indikator Kinerja	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	293	450	515	405	92	275	378	605	n/a	n/a	94	84	117	-	-
Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	-	-	-	100	100	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-
Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien	-	-	-	3	4	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	1	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-
Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	3	3	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-
Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	100	100	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-
Jumlah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan Kecamatan	-	-	-	11	11	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-	-	-	148	400	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-
Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	-	1	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-
Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	72,7	72,7	72,7	73	73	72,7	72,7	98,39	-	n/a	100	100	135	-	-
Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	-	2	-	-	-	-	2	-	-	n/a	-	100	-	-	-
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	50	-	-	-	-	50	-	-	n/a	-	100	-	-	-
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	2	-	-	1	-	2	-	-	n/a	-	100	-	-	-
Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	80	80	80	80	80	80	80	80	n/a	n/a	100	100	100	-	-
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	700	500	50	50	15	830	507	50	n/a	n/a	119	101	100	-	-

Indikator Kinerja	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	190	159	77	84	80	318	199	77	n/a	n/a	167	125	100	-	-
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	479	356	21	128	50	479	356	21	n/a	n/a	100	100	100	-	-
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3	3	2	3	1	3	3	2	n/a	n/a	100	100	100	-	-
Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	467	467	41	41	41	858	494	41	n/a	n/a	184	106	100	-	-
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	467	467	41	41	41	858	483	41	n/a	n/a	184	103	100	-	-
Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	6	62	3	2	3	6	62	3	n/a	n/a	100	100	100	-	-
Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Desa yang dibina dan diawasi	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Desa Yang difasilitasi	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	68	70	74	74,9	73,10	56,00	74,30	n/a	n/a	112	82	106	-	-
Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	6	6	11	11	8	6	6	n/a	n/a	100	100	100	-	-
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	4	3	5	4	4	3	n/a	n/a	100	100	75	-	-
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	1	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	1	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	2	2	5	4	4	4	2	n/a	n/a	100	200	100	-	-
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	2	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	-	-	52	2	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-
Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	1	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-
Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	21	21	21	16	18	21	21	21	n/a	n/a	100	100	100	-	-
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2016	1876	1148	1148	2982	2016	1876	1148	n/a	n/a	100	100	100	-	-
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9	-	-	-	-	9	-	-	n/a	n/a	100	-	-	-	-
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	1	1	1	2	1	1	1	n/a	n/a	100	100	100	-	-
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	14	14	5	12	20	14	14	n/a	n/a	200	100	100	-	-

Indikator Kinerja	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	1	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-
Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	6	6	1030	9863	9863	6	6	1030	n/a	n/a	100	100	100	-	-
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	1	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	1	2	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	1	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-
Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	6	6	6	6	6	6	6	6	n/a	n/a	100	100	100	-	-
Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20	20	20	5	20	20	20	20	n/a	n/a	100	100	100	-	-
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	-	140	-	1	-	171	209	-	n/a	n/a	0,00	149	-	-	-
Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	20	20	-	20	20	20	20	n/a	n/a	100,00	100	100	-	-
Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	6	6	6	6	6	6	6	n/a	n/a	100	100	100	-	-
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	162	125	20	59	11	162	125	20	n/a	n/a	100	100	100	-	-
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	500	120	150	14	1	734	120	150	n/a	n/a	147	100	100	-	-

Indikator Kinerja	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50	25	-	1	3	50	25	-	n/a	n/a	100	100	-	-	-
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40	23	20	71	22	40	73	20	n/a	n/a	100	317	100	-	-
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	26	52	15	11	20	24	26	n/a	n/a	100	92	50	-	-
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1655	1900	1010	718	350	3320	1800	1665	n/a	n/a	201	95	165	-	-
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	96	118	96	96	96	192	245	-	n/a	n/a	200	208	-	-	-
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	5	-	-	-	-	7	-	n/a	n/a	-	140	-	-	-
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	2	-	-	1	2	6	-	n/a	n/a	200	300	-	-	-
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	5	-	-	-	1	5	-	n/a	n/a	100	100	-	-	-
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	190	172	-	30	-	190	227	-	n/a	n/a	100	132	-	-	-
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	1	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-
Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100	100	100		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100	100	100		

Indikator Kinerja	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100	100	100		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100	100	100		
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	150	150	150	150	150	192	96	115	n/a	n/a	133	55	67		
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	-	2	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	2	2	8	8	-	2	2	3	n/a	n/a	100	100	38	-	-
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	133	80	105	70	55	180	80	100	n/a	n/a	135	100	95	-	-
Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6	10	12	11	11	9	10	12	n/a	n/a	150	100	100	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	3	-	-	-	-	3	-	n/a	n/a	-	100	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	-	-	-	1	1	-	n/a	n/a	100	100	-	-	-

Sumber: Kecamatan Loa Janan 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan setiap tahunnya dibandingkan target pada Renstra periode 2021 – 2024 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai dan untuk indikator pertumbuhan pendapatan asli daerah kewenangan kecamatan tidak terealisasi dikarenakan pemungutan retribusi yang ada di Kecamatan sudah dipindah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain:

- adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- merupakan hasil kerjasama Tim seluruh aparatur di lingkup Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan

Indikator Kinerja	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					Presentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Anggaran Kecamatan Loa Janan	121.158.389.482	201.564.291.599	146.284.857.025	117.209.897.240	62.072.870.947	115.315.592.064	192.034.727.688	139.484.029.863	-	-	95,18	95,27	95,35	-	-	-699,44%	19,55%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.700.000.000	114.950.966.377	98.982.085.750	72.191.032.833	18.950.108.250	50.496.155.822	114.469.302.179	98.401.963.661	-	-	99,60	99,58	99,41	-	-	3,00%	56,00%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	434.900.000	450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87%	0,00%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	134.900.000	200.000.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	12,06%	0,00%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	300.000.000	250.000.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-4,17%	0,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	10.000.000	-	33.495.000	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,64%	0,0%
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-25,00%	0,0%

Indikator Kinerja	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					Prsentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	33.495.000,00	100.000.000,00	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	49,64%	0,0%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	50.700.000.000	114.940.966.377	98.982.085.750	71.722.637.833	18.400.108.250	50.496.155.822	114.469.302.179	98.401.963.661	-	-	100	100	99,41	-	-	2,73%	56,3%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	110.000.000	1.387.607.950	930.670.750	1.438.370.750	980.108.250	34.160.000	1.180.785.810	793.368.000	n/a	n/a	31,05	99,59	99,41	-	-	287,81%	1661,9%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50.590.000.000	113.553.358.427	98.051.415.000	70.284.267.083	17.420.000.000	50.461.995.822	113.288.516.369	97.608.595.661	n/a	n/a	99,75	85,10	85,25	-	-	1,82%	55,3%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	39.950.548.494	45.049.378.228	24.814.361.000	22.808.408.900	20.457.400.000	37.503.192.436	42.970.487.821	24.230.474.634	-	-	93,87	95,39	97,65	-	-	-12,64%	-14,5%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	201.615.000	-	-	25.000.000	-	201.204.000	-	-	-	-	99,80	-	-	-	-25,00%	-50,0%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	50.000.000,00	-	-	-	-	49.660.000	-	n/a	n/a	-	99,32	-	-	-	-25,00%	-50,0%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	151.615.000,00	-	-	25.000.000,00	-	151.544.000	-	n/a	n/a	-	99,95	-	-	-	-25,00%	-50,0%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	27.607.317.750	31.292.415.228	16.561.945.000	9.004.785.900	7.001.000.000	26.012.856.677	31.115.066.529	16.376.374.634	-	-	94,22	99,43	98,88	-	-	-25,40%	-13,9%

Indikator Kinerja	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					Presentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	74.404.000	100.000.000	95.000.000	149.522.000	50.000.000	67.225.000	96.290.122	73.282.000	n/a	n/a	90,35	96,29	77,14	-	-	5,06%	9,7%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	13.473.633.750	17.143.996.941	7.390.596.000	6.473.939.060	4.505.000.000	13.413.067.812	17.072.660.792	7.325.668.834	n/a	n/a	99,55	99,58	99,12	-	-	-18,12%	-14,9%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14.019.280.000	14.008.418.287	9.046.349.000	2.337.924.840	2.401.000.000	12.492.566.865	13.906.115.615	8.947.791.800	n/a	n/a	89,11	99,27	98,91	-	-	-26,74%	-12,2%
Evaluasi Kelurahan	40.000.000	40.000.000	30.000.000	43.400.000	45.000.000	39.997.000	40.000.000	29.632.000	n/a	n/a	99,99	100,00	98,77	-	-	5,84%	-13,0%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12.343.230.744	13.555.348.000	8.252.416.000	13.803.623.000	13.431.400.000	11.490.335.759	11.654.217.292	7.854.100.000	-	-	93,09	85,98	95,17	-	-	8,82%	-15,6%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	12.343.230.744	13.000.348.000	8.252.416.000	13.754.363.000	13.381.400.000	11.490.335.759	11.113.438.192	7.854.100.000	n/a	n/a	93,09	85,49	95,17	-	-	8,19%	-16,3%
Penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan	-	555.000.000	-	49.260.000	50.000.000	-	540.779.100	-	n/a	n/a	-	97,44	-	-	-	-24,62%	-50,0%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	141.430.000	175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,93%	0,0%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	141.430.000	175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,93%	0,0%

Indikator Kinerja	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					Presentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,00%	0,0%
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	141.430.000	125.000.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-2,90%	0,0%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	418.250.000	470.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,09%	0,0%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	418.250.000	470.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,09%	0,0%
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-	-	-	418.250.000	430.000.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,70%	0,0%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	-	40.000.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,00%	0,0%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	15.000.000,00	-	-	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,00%	0,0%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	15.000.000,00	-	-	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,00%	0,0%

Indikator Kinerja	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					Prsentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-25,00%	0,0%
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-				75.000.000,00				n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,00%	0,0%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.507.840.988	41.548.946.994	22.488.410.275	21.650.775.507	21.945.362.697	27.316.243.806	34.594.937.688	16.851.591.568	-	-	89,54	83,26	74,93	-	-	-3,01%	-12,3%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	297.050.000	368.338.000	158.304.000	241.084.100	320.000.000	187.690.800	44.634.000	58.468.969	-	-	63,18	12,12	36,93	-	-	13,00%	-22,6%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	225.000.000	73.450.000	62.141.400	40.000.000	40.150.000	44.634.000	39.708.969	n/a	n/a	40,15	19,84	54,06			1,65%	0,1%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	2.480.000	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	- 0	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	2.480.000	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	- 0	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	197.050.000	143.338.000	84.854.000	30.175.600	30.000.000	147.540.800	-	18.760.000	n/a	n/a	74,87	-	22,11	-	-	-33,27%	-50,0%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	23.934.000	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	- 0,25	-
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	108.243.100	250.000.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,33	-

Indikator Kinerja	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					Prsentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	11.630.000	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-0,25	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.154.454.899	24.084.512.402	16.128.284.008	15.608.097.288	16.351.803.619	19.640.516.102	19.148.990.721	11.668.075.898	-	-	92,84	79,51	72,35	-	-	-4,41%	-20,8%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.027.380.199	23.175.472.402	15.595.564.008	14.934.575.088	15.689.083.619	18.784.471.402	18.509.920.721	11.207.567.898			93,79	79,87	71,86	-	-	-4,04%	-20,5%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	188.034.700,00	-	-	-	-	188.034.700	-	-			100,00	-	-	-	-	-25,00%	-50,0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60.000.000	100.000.000	80.000.000	9.826.000	10.000.000	15.290.000	10.120.000	31.708.000			25,48	10,12	39,64	-	-	-9,82%	89,8%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	879.040.000	809.040.000	452.720.000	652.720.000	652.720.000	652.720.000	628.950.000	428.800.000			74,25	77,74	94,72	-	-	-1,96%	-17,7%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	10.976.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,00%	0,0%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.800.000,00	60.800.000,00	40.800.000,00	223.428.800,00	90.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	-	-	100	67	100			101,10%	0,0%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	12.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,00%	0,0%

Indikator Kinerja	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					Prsentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	147.720.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,54%	0,0%
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	22.408.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,00%	0,0%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.800.000	60.800.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000			100	67,11	100	-	-	4,03%	0,0%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.690.000	680.576.818	50.000.000	2.284.000	35.000.000	27.960.000	644.649.820	21.073.200	-	-	70,45	94,72	42,15	-	-	714,76%	1054,4%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	530.756.000	-	2.284.000	-	-	513.238.000	-			-	96,70	-	-	-	-50,00%	-50,0%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39.690.000	149.820.818	50.000.000	-	35.000.000	27.960.000	131.411.820	21.073.200			70,45	87,71	42,15	-	-	27,71%	143,0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.084.810.581	3.581.724.075	1.853.185.075	1.516.074.170	800.713.130	1.922.747.992	3.286.076.612	1.671.169.668	-	-	92,23	91,75	90,18	-	-	-10,46%	10,9%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.530.000	44.230.000	98.613.000	131.871.000	131.871.000	36.318.700	43.248.700	84.168.000			99,42	97,78	85,35	-	-	44,44%	56,8%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	255.000.000	477.865.000	374.102.900	198.675.840	5.000.000	251.010.167	469.981.736	362.761.500			98,44	98,35	96,97	-	-	-19,67%	32,2%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.906.000	326.457.000	-	10.457.000	10.457.000	24.487.000	317.469.000	147.314.000			98,32	97,25	-	-	-	277,69%	571,4%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	309.773.506	513.831.000	181.411.000	180.387.500	214.387.500	251.255.100	406.675.600	-			81,11	79,15	0,00	-	-	4,87%	-19,1%

Indikator Kinerja	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					Prsentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	147.099.075	137.229.075	90.109.175	47.950.580	63.997.630	105.103.000	81.123.643	26.776.000			71,45	59,12	29,72	-	-	-13,59%	-44,9%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.311.502.000	2.082.112.000	1.108.949.000	946.732.250	375.000.000	1.254.574.025	1.967.577.933	1.050.150.168			95,66	94,50	94,70	-	-	-15,75%	5,1%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.000.760.000	5.203.096.620	-	308.573.200	270.000.000	913.452.188	5.064.209.180	-	-	-	91,28	97,33	-	-	-	76,85%	177,2%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	1.247.800.000	-	-	-	163.176.600	1.241.001.230	-			-	99,46	-	-	-	-25,00%	280,3%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.000.000	962.720.000	-	-	100.000.000	-	946.320.000	-			-	98,30	-	-	-	56,97%	-50,0%
Pengadaan Mebel	26.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	25.832.000	37.890.000	-			99,35	94,73	-	-	-	-11,54%	-26,7%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	749.760.000	2.952.576.620	-	308.573.200	-	724.443.588	2.838.997.950	-			96,62	96,15	-	-	-	23,45%	95,9%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	170.000.000						-	-	-	-	-	0,00%	0,0%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.337.843.708	5.556.377.257	3.868.829.392	3.420.260.899	3.800.218.148	4.110.647.243	4.424.954.551	3.121.300.269	-	-	77,01	79,64	80,68			-6,69%	-10,9%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.489.000	40.489.000	23.740.000	33.540.000	7.500.000	37.405.000	37933000	18.829.000			92,38	93,69	79,31			-19,43%	-24,5%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.092.510.000	1.824.479.660	1.458.969.391	1.594.473.206	1.634.335.036	1.345.247.504	1445793533	1.232.621.263			64,29	79,24	84,49			-5,26%	-3,6%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.204.844.708	3.691.408.597	2.386.120.001	1.792.247.693	2.158.383.112	2.727.994.739	2941228018	1.869.850.006			85,12	79,68	78,36			-6,16%	-14,3%

Indikator Kinerja	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					Prsentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	552.431.800	2.013.521.822	389.007.800	330.973.050	276.827.800	472.429.481	1.940.622.804	270.703.564	-	-	85,52	96,38	69,59			38,13%	112,4%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	51.250.000	-	-	-			-	-	-			0,00%	0,0%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000	40.000.000	110.000.000	50.000.000	-	19.399.701	6.689.100	14.417.200			24,25	16,72	13,11			-7,39%	25,0%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.321.800	90.021.800	90.232.800	80.702.800	81.802.800	62.015.000	76.172.000	70.295.000			77,21	84,62	77,90			0,78%	7,6%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	382.110.000	1.458.500.022	188.775.000	200.270.250	143.775.000	381.129.780	1.449.338.410	185.991.364			99,74	99,37	98,53			43,13%	96,6%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	325.000.000,00	-	-	-	9.885.000,00	308.709.694	-			-	94,99	-			-25,00%	1461,5%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	99.713.600	-			-	99,71	-			200,00%	-50,0%

Sumber : Data Kecamatan Loa Janan

Adapun Sumber keuangan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Camat Loa Janan adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Tabel di atas menyajikan data anggaran berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dan data realisasi berdasarkan pagu anggaran DPA, ada tiga program utama Kecamatan Loa Janan dari tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik diatas 100%, bahkan mencapai 646,90% pada 2023, karena dari Tahun 2023 ke bawah Kecamatan Loa Janan masih membawahi 8 Desa dan 1 Desa (DOB).

Secara keseluruhan, Kecamatan Loa Janan menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat penurunan alokasi pada beberapa program karena adanya penyesuaian anggaran pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari tabel di atas juga menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara antara tahun 2021 s/d 2026 cukup baik dengan rata-rata penyerapan di atas 90%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Loa Janan sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik dalam pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain:

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kerjasama tim pengelola anggaran yang memadai baik Pengguna Anggaran, Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Loa Janan.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran di beberapa Sub Kegiatan dan tidak bisa 100% seperti seperti penyediaan jasa komunikasi dan Listrik, Belanja Gaji dan Tunjangan dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum.

2.1.3 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Loa Janan yaitu:

- Penduduk kecamatan: Semua individu yang terdaftar sebagai penduduk di wilayah kecamatan.
- Perangkat daerah: Aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan/ Desa
- Organisasi kemasyarakatan: Lembaga-lembaga0020swadaya masyarakat, organisasi pemuda, PKK, dan lain-lain.
- Dunia usaha: Pelaku bisnis dan industri kecil di kecamatan.
- Kelompok rentan: Termasuk perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.
- Pihak lain yang membutuhkan pelayanan: Institusi pendidikan, tempat ibadah, dan lain-lain.

2.1.4 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam pemberian layanan Kecamatan Loa Janan dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan Loa Janan maupun perangkat

daerah yang berada di luar wilayah kecamatan Loa Janan antara lain:

- a.** Polsek Kecamatan Loa Janan, untuk menyediakan layanan kemanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
- b.** Koramil Loa Janan, untuk membantu dalam aspek pertahanan dan kemanan, serta kegiatan sosial masyarakat.
- c.** Kantor Urusan Agama, untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu jika pernikahan mendadak ingin dilakukan dari batas waktu pengurusan administrasi yang sudah ditentukan.
- d.** Satpol PP,
- e.** Kesbangpol,
- f.** Damkar,
- g.** BPBD,
- h.** Dinas Pertanian dan Perkebunan
- i.** DP3A,
- j.** Perkim,
- k.** DLHK,
- l.** Rumah Sakit dan Puskesmas, untuk melakukan pelaksanaan Donor Darah dan pengurusan BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu.
- m.** Bappeda, untuk memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bappeda juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah kecamatan Loa Janan berjalan dengan baik dan terarah.

- n.** DPMD, untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa/Kelurahan dan koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan. DPMD juga memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat desa dan Kelurahan.
- o.** Disdukcapil, mitra kerja dalam hal layanan penerbitan Akta kelahiran Tuntas di Kecamatan dan penerbitan Kartu Keluarga Tuntas di Kecamatan serta Perekaman KTP-el bagi pemula.
- p.** Tim Penggerak PKK di tingkat Kecamatan, meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK di Tingkat RT. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Diadakan Sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Loa Janan.
- q.** Inspektorat, untuk Kecamatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta Evaluasi kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dari Kecamatan.
- r.** Bapenda, mitra kerja pelayanan di Kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah.
- s.** Dinas Sosial, mitra pelayanan di Kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan, rehabilitas, dan pemberdayaan sosial. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.

- t.** Dinas Koperasi, mitra kerja dengan terkait UMKM dalam bentuk pembinaan, seperti pelatihan, bantuan permodalan, pendampingan izin usaha, serta fasilitas pengembangan dan perlindungan usaha.
- u.** Dinas Perhubungan, mitra kerja yaitu terkait dengan LPJU dan Tranportasi pada wilayah Kecamatan.
- v.** Diskominfo,

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Masyarakat Kecamatan Loa Janan sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik, cepat dan gratis sebagaimana tercantum dalam sasaran kecamatan Loa Janan adalah “Meningkatnya layanan administrasi Kecamatan” Pelayanan dapat dicapai dengan kemauan yang tinggi dari Pegawai Kecamatan Loa Janan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Loa Janan. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Loa Janan maka dapat dirumuskan permasalahan di wilayah ini. Permasalahan kecamatan dikelompokkan kedalam 3 (tiga) hal yaitu pokok masalah, masalah, dan akar masalah.

Tabel 2.10
Pemetaan Permasalahan Kecamatan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Pelayanan Kecamatan	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang sesuai dengan SOP	Kurangnya pemahaman Kebijakan/Regulasi baik berupa delegasi maupun pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
		Masih minimnya infrastruktur yang mendukung dalam pelayanan publik khususnya berbasis digital
		Kurangnya tenaga teknis dengan keahlian khusus dalam memberikan pelayanan
		Kurangnya harmonisasi kebijakan lintas sektor yang berdampak pada pelaksanaan pelayanan publik.
		Sosialisasi kebijakan atau program kecamatan yang belum merata
		Adanya hambatan proses pencetakan e-KTP karena mesin rusak
	Belum optimalnya efektivitas implementasi program, khususnya pada kewenangan yang sudah dilimpahkan ke kecamatan	Tumpang tindih kebijakan antara kecamatan dan kabupaten (perangkat daerah teknis)
		Rendahnya sinergi antara kecamatan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan program lintas sektoral.
		Kurangnya pedoman teknis terkait pelaksanaan pelimpahan kewenangan.

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	Masih adanya permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, konektivitas, trantibum, lingkungan hidup, dan perlindungan sosial terutama terhadap kelompok rentan dan marjinal (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, masyarakat adat, dll.)	Belum optimalnya pembinaan terhadap Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
		Belum optimalnya koordinasi pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur dengan perangkat daerah lain dan pihak terkait
		Belum optimalnya pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
		Keterbatasan infrastruktur teknologi yang menjangkau seluruh wilayah kecamatan
		Kemampuan ekonomi sebagian masyarakat yang rendah sehingga terbatas dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
		Keterbatasan akses jalan menuju kantor kecamatan atau desa tertentu
		Belum tersedianya transportasi umum yang memadai untuk menuju kecamatan, hanya tersedia moda transportasi antar kota.
		Masih adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
		Belum optimalnya pembinaan koperasi dan UMKM bersama dengan dinas teknis

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pembinaan pengelolaan keuangan desa yang diprioritaskan untuk mendukung prioritas daerah dan nasional, antara lain penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, stunting, dll
		Kerusakan ekosistem akibat penambangan batubara ilegal di sekitar Waduk Loa Janan
	Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Desa	Belum optimalnya peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Masih terbatasnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola pendapatan asli desa
		Masih terbatasnya pembinaan terhadap aparatur desa
		Belum optimalnya pengelolaan BUMDes
	Belum optimalnya tata kelola kecamatan	Minimnya pelaksanaan forum atau pertemuan rutin untuk membahas program lintas sektoral di tingkat kecamatan
		Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di kecamatan oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan pengawasan internal pemda.
		Kekurangan staf yang kompeten untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis.

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		Kurangnya pelatihan bagi perangkat kecamatan tentang pengelolaan administrasi modern, termasuk pengelolaan keuangan.
		Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program yang diselenggarakan kecamatan
		Tidak adanya sistem pencatatan data yang terintegrasi secara real-time.
		Lemahnya pengawasan dan verifikasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data.

Sumber: hasil analisis, 2025

2.2.1 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dan daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penentuan isu strategis Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara mempertimbangkan permasalahan, isu KLHS, serta isu lingkungan dinamis (global, nasional, dan regional).

Sebelum perumusan isu strategis kecamatan, berikut ini dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan program prioritas kepala daerah, dan telaahan terhadap RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, serta beberapa aspek lainnya.

1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perencanaan dimulai dengan merumuskan Visi, Misi, dan nilai-nilai. Visi mencerminkan apa yang ingin dicapai instansi, memiliki orientasi kedepan agar dapat eksis, bersifat antisipatif, dan inovatif.

Adapun Visi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditetapkan sebagai berikut:

” Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan “

Misi merupakan tindakan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visinya. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh perangkat daerah dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Sedangkan Misi yang diemban untuk mencapai Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif;
3. Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;
4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal;
5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih diatas dari 5 Misi Kecamatan Loa Janan mendukung dalam mencapai Misi ke 3 dan Misi ke 4, selanjutnya dijabarkan dalam 17 Program Dedikasi yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah:

Gambar 2.3

17 Program Dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

17 PROGRAM DEDIKASI



Misi#1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;	Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia; Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa Program Bantuan Sekolah Swasta/Pondok Pasantren Idaman Terbaik Program Etam Sejahtera
Misi#3. Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.	Program Pelayanan Publik Cerdas Program ASN Kukar Terbaik
Misi#5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.	Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik. Program Internet Desa Gratis. Program Permukiman Idaman Terbaik.
Misi#2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif	Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera Program Petani/Peternak/Nelayan Tangguh Program Kredit Kukar Idaman Terbaik. Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah. Program Stimulus Komunitas Kreatif
Misi#4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.	Program RT Ku-Terbaik Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku. Program Jaga Lingkungan Lestari

Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan tugas dan fungsi, maka kecamatan mendukung secara langsung ke program dedikasi:

- a). Program Pelayanan Publik Cerdas;
- b). Program RT-ku Terbaik;

Selain itu, kecamatan juga mendukung secara tidak langsung terhadap program-program dedikasi lainnya. Adapun penjelasan kedua program dedikasi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Publik Cerdas

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas layanan publik, dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi sebagai pendorong dalam pelaksanaan prinsip-prinsip smart and good

governance hingga tercipta tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan kegiatan prioritas adalah pembangunan mini mall pelayanan publik cerdas pada setiap kecamatan yang diintegrasikan dengan konsep kecamatan sebagai Pusat Data dan Layanan Informasi.

b. Program RT Ku-Terbaik

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk mendorong dan mengoptimalkan peran lembaga RT sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas ketertiban dan kenyamanan warga, dengan memperkuat Program 50 Juta per RT, menjadi minimal 150 Juta Per-RT dan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah, program ini diarahkan pada penguatan hubungan sosial kemasyarakatan, keamanan, keagamaan, bina lingkungan, prasarana dan sarana umum pada skala RT, serta memperkuat penyediaan data administrasi kependudukan yang lebih aktual dan valid yang dikemas dalam program-program swakelola tematik sesuai dengan hasil musyawarah RT yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam hal mengawal proses pelaksanaan program, maka diperkuat dengan peningkatan kapasitas Pendekar Idaman, dengan pola kerja yang terstruktur, responsif, cakap dalam mengelola dinamika pembangunan desa/kelurahan secara bertanggung jawab. Khusus untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, maka diperkuat dengan optimalisasi aparat keamanan di tingkat satuan wilayah terkecil (desa/kelurahan) yakni Penyediaan bantuan operasional Babinsa dan Babinkamtibmas, serta untuk memperkuat aktivitas pemberdayaan masyarakat di wilayah desa/kelurahan, maka

alokasi RT dapat menunjang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan memberikan bantuan operasional/insentif, selanjutnya pola distribusi alokasi program per RT diperkuat pula dengan pengalokasian anggaran per tahun secara proporsional berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK), dengan alokasi minimal sebesar Rp. 1 Juta per KK.

2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup di wilayah Kecamatan adalah Proses evaluasi dan analisis terhadap rencana tata ruang wilayah kecamatan, yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan berkelanjutan. Ini mencakup penilaian kesesuaian rencana dengan kondisi lingkungan, potensi dampak, serta upaya mitigasi dan pelestarian lingkungan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu:

- Kegiatan Pasca Tambang Belum Dilakukan dengan Baik

Kegiatan pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama tambang batubara, meninggalkan banyak lahan dengan karakteristik pasca tambang yang merusak. Lubang besar, penurunan muka tanah, dan potensi longsor menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan lingkungan hidup. Proses reklamasi yang seharusnya menjadi kewajiban belum terlaksana optimal, menyebabkan gangguan ekologis jangka panjang serta memperparah kerusakan lahan dan menurunkan nilai produktivitas wilayah.

- Kerusakan Hutan Dan Lahan

Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami tingkat kerusakan hutan dan perubahan lahan yang cukup tinggi. Penebangan liar, perambahan lahan, dan kegiatan

pertambangan ilegal menjadi penyebab utama degradasi kawasan hutan yang luasnya mencapai lebih dari 83% dari total wilayah kabupaten. Dari kawasan ini, sekitar 52% merupakan hutan produksi yang semestinya dijaga keberlanjutannya. Namun, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum mengakibatkan ekosistem hutan rentan rusak dan kehilangan fungsi ekologis

- **Perubahan Lingkungan Sekitar Perairan Sungai dan Danau**

Perubahan lingkungan juga terlihat nyata di wilayah perairan, pesisir, dan danau. Ekosistem mangrove di Delta Mahakam rusak parah, menyebabkan abrasi meningkat hingga 10 kali lipat dari biasanya. Intrusi air laut di DAS Mahakam memperburuk kualitas air minum masyarakat. Di wilayah 3 danau (Jempang, Semayang, dan Melintang), menurunnya vegetasi air, kualitas air yang tercemar, serta pendangkalan sungai telah mengganggu sistem hidrologi dan keanekaragaman hayati. Kondisi ini diperparah oleh pembangunan permukiman dan konversi lahan yang tidak terkendali.

- **Alih Fungsi Lahan**

Alih fungsi lahan menjadi isu krusial yang perlu segera diantisipasi. Banyak lahan pertanian produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara yang beralih menjadi kawasan tambang, industri, maupun permukiman tanpa perencanaan yang komprehensif. Hal ini mengancam ketahanan pangan daerah dan menurunkan daya dukung lingkungan. Ketidadaan regulasi spesifik di tingkat kabupaten mengenai pembatasan alih fungsi lahan memperburuk kondisi, dan menyebabkan konflik ruang serta ketidakseimbangan pembangunan wilayah.

3. Potensi Kecamatan Loa Janan

Kecamatan Loa Janan memiliki potensi yang sangat beragam dan strategis, diantaranya:

A. Kekayaan Sektor Sumber Daya Alam:

- Pertanian dan Perkebunan: Potensi besar sebagai lumbung pangan dengan komoditas seperti padi, nanas, sayuran, kelapa sawit, karet, kelapa dalam, lada, dan buah naga. Didukung keberadaan Waduk Loa Janan sebagai sumber irigasi.
- Perikanan air tawar: Merupakan penghasil ikan air tawar di Kutai Kartanegara.
- Peternakan: Potensi untuk sapi potong, ayam potong, ayam buras, dan kambing.
- Kehutanan: Memiliki Kawasan dengan flora dan fauna, potensi wisata alam yang berada pada wisata Bekantan Sungai Hitam.
- Pertambangan dan Industri: Keberadaan industri gas, minyak, batu bara, ternak potong, dan pengolahan limbah minyak.
- Sektor Pariwisata: Potensi Destinasi alam menarik seperti yang siap dikembangkan

B. Memiliki Posisi Strategis, terletak di wilayah tengah Kabupaten Kutai Kartanegara dan secara geografis sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan dan Selat Samarinda. Sebagian wilayah Kecamatan Loa Janan juga telah ditetapkan sebagai bagian dari delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) baru Indonesia, membuka peluang signifikan untuk pengembangan ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik di masa depan.

4. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang relevan dengan Kecamatan

Beberapa isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang relevan dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu: Ketahanan Pangan sebagai Daerah Mitra IKN, Peningkatan Sanitasi dan Distribusi Air Bersih bagi Masyarakat, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, dan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor).

5. Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD

- Aspek Global: Intinya adalah dampak perubahan iklim (seperti banjir, kekeringan) dan tekanan dari permintaan pasar dunia untuk sumber daya alam (misal: sawit, batubara) yang memengaruhi lingkungan Loa Janan.
- Aspek Nasional: Intinya adalah dampak besar dari pembangunan IKN (misal: perubahan lahan, peningkatan sampah, tekanan penduduk) dan pengaruh kebijakan nasional terkait energi/lingkungan terhadap Loa Janan.
- Aspek Regional: Intinya adalah masalah lingkungan lokal dan antar wilayah seperti pencemaran sungai, masalah sampah, dan kejadian banjir yang sering terjadi di sekitar Loa Janan dan Kalimantan Timur.
- Pengelolaan Sampah: Volume sampah yang tinggi (sekitar 35,7 ton per hari) dengan belum adanya tempat pembuangan akhir (TPA) yang memadai, kurangnya

regulasi pengelolaan sampah, dan adanya tempat pembuangan sampah ilegal.

- Kualitas Air Sungai: Penurunan kualitas mutu air Sungai Loa Janan yang dikategorikan "tercemar sedang" hingga "tercemar parah" di beberapa titik, mengancam ketersediaan air bersih.
- Banjir: Permasalahan banjir yang masih sering terjadi, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak perubahan tata guna lahan atau dampak pembangunan infrastruktur yang kurang terencana (termasuk yang terkait IKN, seperti longsor dan jalan terbelah).

6. Isu Strategis Perangkat Daerah (Kecamatan Loa Janan)

- Dampak dan Peluang IKN: Meskipun masuk delineasi IKN, pembangunan infrastruktur fisik dari pemerintah pusat belum signifikan, sementara pengembangan SDM sudah mulai dilakukan. Ada ketidakjelasan peralihan tanggung jawab pembangunan dari Pemkab ke Pemerintah Pusat, sehingga pembiayaan dan pembangunan masih ditangani Pemkab Kukar. Hal ini menimbulkan tantangan koordinasi dan pemanfaatan peluang IKN secara optimal.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (excellent service) yang cepat, mudah, murah, efisien, dan transparan, serta berbasis elektronik.
- Peningkatan Infrastruktur: Prioritas perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pendidikan yang masih sangat minim di beberapa wilayah.
- Kemiskinan dan Stunting: Tingginya angka kemiskinan dan prevalensi stunting menjadi isu strategis yang

membutuhkan program penanggulangan terkoordinasi dan efektif.

- Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Kebutuhan untuk mengelola potensi daerah secara berkelanjutan, mengatasi permasalahan lingkungan akibat eksploitasi (terutama batubara), dan memastikan kelestarian ekosistem.
- Tata Kelola Pemerintahan: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis elektronik dan peningkatan kompetensi aparatur.

Berdasarkan pemaparan gambaran umum pelayanan, identifikasi permasalahan, serta analisis mendalam terhadap berbagai isu strategis—termasuk dimensi KLHS dan isu lingkungan dinamis pada skala global, nasional, dan regional—dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Loa Janan memiliki potensi besar namun juga menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius. Pemahaman menyeluruh terhadap kondisi eksisting dan proyeksi isu ke depan ini menjadi landasan krusial dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan. Dengan demikian, langkah selanjutnya adalah menetapkan visi dan misi yang jelas, serta merancang program kerja yang adaptif dan solutif untuk mencapai pembangunan Kecamatan Loa Janan yang lebih maju dan berkelanjutan dalam periode 2025-2029. Adapun teknik penyimpulan Isu Strategis sebagai berikut:

Tabel 2.10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	Kutai Kartanegara	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemerintah Daerah mendorong program hilirisasi komoditas unggulan dengan pembangunan industri pengolahan yang terintegrasi dekat sumber bahan baku	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang sesuai dengan SOP	Ketahanan Pangan sebagai Daerah Mitra IKN	Adanya Pergeseran Budaya Dampak Dari Teknologi Informasi	Rendahnya Produktivitas	Peluang Pembangunan Superhub Ekonomi dan Mitra IKN	Akselerasi Pembangunan Kutai Kartanegara Sebagai Penyangga IKN	Dampak dan Peluang IKN
Memiliki posisi yang strategis (dekat dengan IKN)	Belum optimalnya efektivitas implementasi program, khususnya pada kewenangan yang sudah dilimpahkan ke kecamatan	Peningkatan Sanitasi dan Distribusi Air Bersih bagi Masyarakat			Pemerataan Pembangunan Wilayah	Pemerataan pelayanan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan handal	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	Kutai Kartanegara	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kekayaan Sektor Sumber Daya Alam, antara lain Pertanian dan Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Peternakan, Kehutanan, Pariwisata, serta Pertambangan dan Industri	Masih adanya permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, konektivitas, trantibum, lingkunagn hidup, dan perlindungan sosial terutama terhadap kelompok rentan dan marjinal (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, masyarakat adat, dll.)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar		Potensi Sumber Daya Manusia Dan Modal Manusia	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM	Akselerasi peningkatan daya saing SDM yang sehat dan cerdas	Peningkatan Layanan Infrastruktur
Tingginya partisipasi masyarakat yang berkolaborasi & terlibat Komunitas dalam Pembangunan	Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Desa	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat		Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat			Kemiskinan dan Stunting
Desa Mandiri sebagai Pilar Ketahanan Sosial yang cukup kuat di Kabupaten Kutai Kartanegara	Belum optimalnya tata kelola kecamatan	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					Pengembangan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	Kutai Kartanegara	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ekosistem Pesisir sebagai “Karbon Biru” & Keanekaragaman Hayati Penguatan Regulasi Lingkungan Terbaru		Pengarusutam aan Gender dalam Pembangunan					Tata Kelola Pemerintahan
		Pencegahan dan Penanggulang an Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor)					
			Perkembangan Teknologi	Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		

Sumber: hasil analisis, 2025

Penjelasan masing-masing isu strategis Kecamatan Loa Janan dalam kurun waktu 2025 –2029, adalah sebagai berikut:

1. Integrasi dengan Pembangunan IKN Nusantara.

Dekatnya Kecamatan Loa Janan dengan IKN Nusantara membuka peluang besar untuk pengembangan infrastruktur dan ekonomi lokal. Sebagai bagian dari wilayah yang berdekatan dengan pusat pemerintahan baru, Kecamatan Loa Janan diproyeksikan akan mengalami perkembangan pesat, baik dari segi infrastruktur maupun migrasi penduduk. Namun, peluang ini juga membawa tantangan besar, terutama terkait tekanan terhadap lahan produktif, potensi konflik tata ruang, dan dampak sosial-ekonomi dari proses urbanisasi yang cepat.

Pemerintah Kecamatan Loa Janan harus segera menyelaraskan kebijakan tata ruang dengan kebijakan pembangunan IKN Nusantara untuk menghindari konflik penggunaan lahan dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang. Kolaborasi dengan instansi terkait, termasuk pihak pemerintah pusat dan IKN, akan menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berjalan harmonis. Selain itu, meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek pembangunan akan memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial dari IKN dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga harus mengantisipasi dampak sosial-ekonomi dari migrasi penduduk yang dipicu oleh pembangunan IKN, seperti peningkatan kebutuhan akan perumahan, fasilitas umum, dan lapangan pekerjaan.

2. Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sistem pelayanan publik di Kecamatan Loa Janan masih banyak yang dilakukan secara manual, yang menghambat efisiensi dan transparansi. Dalam era digitalisasi ini, penerapan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mempercepat proses

pelayanan, meningkatkan efisiensi kerja, dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.

Pemerintah kecamatan harus segera melakukan digitalisasi administrasi dan pelayanan publik dengan mengadakan perangkat keras dan lunak yang memadai. Selain itu, pelatihan bagi aparatur pemerintah dalam bidang teknologi informasi dan pengembangan aplikasi pelayanan publik sangat diperlukan. Aplikasi pelayanan publik ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, perizinan, pengelolaan data penduduk, serta mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan, program, dan layanan pemerintah.

3. Peningkatan Layanan Infrastruktur

Meskipun Kecamatan Loa Janan memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, infrastruktur dasar di wilayah ini masih terbatas. Beberapa jalan penghubung antar desa dalam kondisi rusak, fasilitas pelayanan publik kurang memadai, dan akses internet yang terbatas menjadi masalah utama. Kondisi ini menghambat perkembangan ekonomi, akses pendidikan, serta kualitas pelayanan publik.

Untuk mengatasi masalah ini dalam lima tahun mendatang, pemerintah kecamatan perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi perbaikan jalan antar desa, peningkatan fasilitas kantor kecamatan dan kelurahan, serta perluasan jaringan internet untuk mendukung digitalisasi pelayanan publik. Pemerintah juga perlu melakukan perencanaan yang matang dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten serta sektor swasta untuk memperoleh pendanaan yang diperlukan. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan Kecamatan Loa Janan dapat menjadi kawasan yang lebih terhubung, efisien, dan siap menyambut tantangan pembangunan di masa depan.

4. Kemiskinan dan Stunting

Kemiskinan dan Stunting saling keterkaitan antara kondisi ekonomi keluarga yang buruk dengan kejadian stunting pada anak, yang memerlukan solusi komprehensif melalui peningkatan kualitas SDM, program ketahanan pangan, serta perluasan akses pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial untuk menciptakan generasi penerus yang sehat dan produktif. Kondisi ekonomi keluarga yang rendah dapat menghambat kemampuan orang tua untuk menyediakan makanan bergizi seimbang bagi anak, termasuk pada ibu hamil masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan, yang dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif, yang pada akhirnya Dengan adanya pengembangan potensi kewilayahan, diharapkan Kecamatan Loa Janan bisa memanfaatkan peluang besar ini. Dapat mengurangi kemiskinan dengan menyediakan banyak lapangan pekerjaan melalui UMKM yang ada pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Dengan semakin berkembangnya perekonomian masyarakat sedikit demi sedikit masalah kemiskinan bisa berkurang, seiring dengan berkurangnya kemiskinan maka masalah stunting pun bisa teratasi menyebabkan stunting.

Selain mengembangkan perekonomian masyarakat, pihak kecamatan pun perlu bekerjasama dengan semua pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan keluarga, dalam gerakan percepatan penurunan stunting dan mencegah stunting. Dengan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan melalui posyandu, karena mengatasi kemiskinan dan stunting memerlukan pendekatan yang komprehensif, kegiatan yang bisa dilakukan seperti diversifikasi pangan yaitu mendorong pangan lokal yang beragam dan bergizi untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis makanan seperti beras, peningkatan akses layanan dasar dan meningkatkan 99 peran perempuan serta

pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesadaran gizi, sanitasi dan kebersihan.

5. Pengembangan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup

Kecamatan Loa Janan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk hutan, perkebunan, dan perikanan. Sektor ekonomi lokal di Kecamatan Loa Janan, seperti pertanian, perikanan, dan UMKM, menghadapi berbagai tantangan, antara lain terbatasnya akses ke modal, teknologi, dan pasar. Hal ini menghambat potensi sektor-sektor tersebut untuk berkembang lebih pesat.

Pemerintah kecamatan perlu mendorong investasi di sektor hilir, seperti pengolahan hasil pertanian dan perikanan, untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Program-program pelatihan berbasis kebutuhan lokal juga harus diadakan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, memperkuat koperasi sebagai wadah untuk pelaku UMKM dalam mengakses modal dan pasar perlu menjadi prioritas. Peningkatan akses ke pasar regional dan nasional juga harus dilakukan melalui penguatan infrastruktur transportasi dan promosi produk lokal, sehingga masyarakat Loa Janan dapat lebih mudah memasarkan hasil pertanian dan perikananannya.

Namun, eksploitasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan ancaman serius bagi kelestarian alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, terutama pada kawasan pesisir dan sungai. Kontaminasi air akibat limbah domestik dan industri merupakan salah satu masalah besar yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitar.

Untuk menghadapi masalah ini dalam lima tahun ke depan, pemerintah kecamatan akan melakukan rehabilitasi lahan kritis khususnya pada lahan bekas tambang. Hal ini diupayakan dengan

berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis dan pihak lain termasuk peran masyarakat dan swasta. Program edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya pelestarian lingkungan juga akan ditingkatkan, baik kepada masyarakat umum maupun pelaku industri dan usaha. Selain itu, kecamatan dapat memanfaatkan peluang kerjasama dengan IKN Nusantara untuk implementasi teknologi ramah lingkungan.

6. Tata Kelola Pemerintahan

Dalam menghadapi tantangan pengembangan kewilayahan tentunya tata kelola pemerintahan perlu untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, serta koordinasi yang efektif untuk mengatasi isu seperti ketenteraman masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan kualitas pembangunan lingkungan, sangat di perlukan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Pemerintahan Kecamatan Loa Janan pada saat ini masih mengalami kendala dalam hal pelayanan publik, karena jumlah Sumber Daya Manusia dan kompetensi yang ada belum terpenuhi, sehingga perlu penyediaan sumber daya manusia yang smart dan profesional, dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur kecamatan, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pelatihan. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan sarana prasarana pendukung demi lancarnya pelayanan yang diberikan agar tercapainya pemerintahan akuntabel dan berorientasi.

Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik seperti kompleksitas di mana implementasi tata 101 kelola pemerintahan yang baik melibatkan banyak aspek dan memerlukan intervensi yang kompleks, selanjutnya perlu adanya komitmen dan sinergi dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat

untuk mencapai tujuan bersama serta Setiap daerah memiliki permasalahan pemerintahan yang berbeda, sehingga implementasi tata kelola harus disesuaikan dengan konteks lokal.

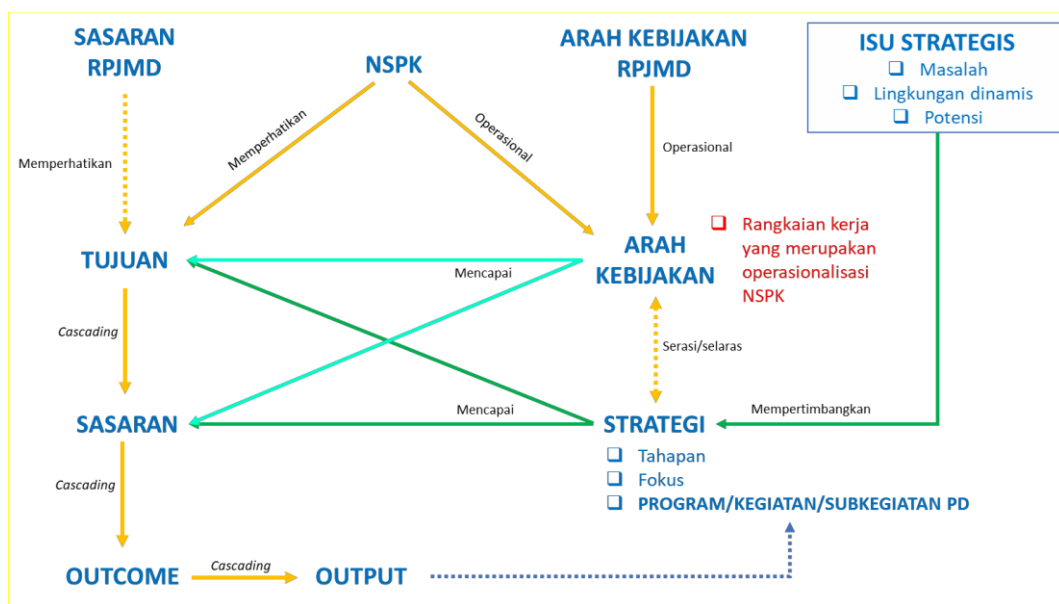
BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Loa Janan dilakukan dengan konsep seperti gambar berikut:

Gambar 3.1.

Konsep Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Hubungan antara tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Tujuan dan sasaran dicapai dengan beberapa strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Loa Janan

a. Tujuan Renstra Kecamatan Loa Janan

Tujuan Renstra Pemerintah Daerah tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan saasaran RPJMD. Kecamatan Loa Janan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu "Meningkatnya kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan". Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Loa Janan, yaitu memberikan pelayanan yang prima di wilayah kecamatan bagi seluruh masyarakat.

Tujuan tersebut selaras dengan Misi 3 RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, yaitu "Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara." Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan ujung tombak dalam mencapai keberhasilan visi pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berusaha meningkatkan profesionalisme ASN untuk mengoptimalkan keberhasilan pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan Renstra Kecamatan Loa Janan mendukung sasaran RPJMD: Meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang berada pada tujuan 2 RPJMD yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya Saing.

b. Sasaran Renstra Kecamatan Loa Janan

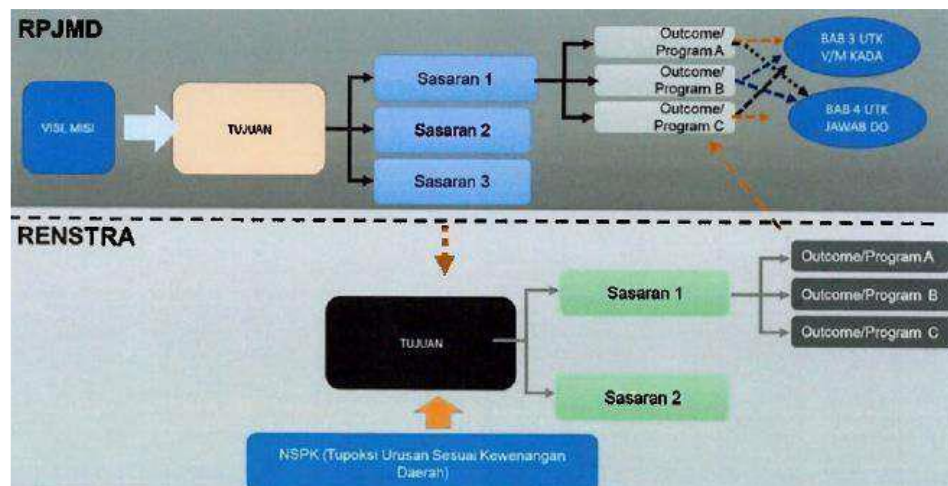
Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah. Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan

pembangunan daerah. Adapun sasaran strategis Kecamatan Loa Janan adalah "Meningkatnya kualitas layanan administrasi di Kecamatan".

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.2.

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dapat terlihat pada tabel di dan gambar bawah ini:

Gambar 3.2



Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELIN E 2024	TARGET TAHUNAN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NSPK: Dasar hukum dari bab 1 terkait kecamatan dan kelurahan/desa Sasaran RPJMD:Meningkat nya kualitas pelayanan publik	Meningkatk an kinerja pembangun an kewilayahan di kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	n/a	3,66	3,67	3,68	3,69	3,70	3,71	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kecamatan berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.
		Meningkatn ya layanan administrasi di Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Pelayanan yang sesuai SOP dibagi total jumlah Pelayanan dikali 100

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang tertib			Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan yang tertib dan Baik	n/a	78	81	84	87	90	91	Jumlah Desa yang tertib administrasi dan keuangan Penilaian Keuangan: 1. Pengesahan APBDes per 31 Des di aplikasi siskuedes web (20%) Cara hitung: (jumlah desa tepat waktu / jumlah desa di kecamatan). 2. Desa yang optimal menggunakan aplikasi ATKPDdes secara 100% (15%) Cara Hitung:Jumlah desa yang optimal menggunakan aplikasi/jumlah desa dikec 3. Persentasi realisasi anggaran (20%) Cara Hitung: jumlah anggaran yang terlaksana 100% / jumlah anggaran desa Penilaian Administrasi: 1. Penyampaian Perdes LPPDes, Perdes Pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya dan laporan keterangan kades akhir 31 Maret (10%) cara Hitung: jumlah desa yang menyampaikan di akhir 31 maret/ jumlah desa di kec 2. Penyampaian laporan kinerja BPD per 31 April (10%) Cara Hitung: Jumlah Desa yang menyampaikan laporan per 31 april/jumlah desa 3. Pengisian Prosdeskel dan Sdgs (10%) cara hitung: Jumlah desa yang melakukan pengisian prodeskel dan SDGS/jumlah semua desa 4. Laporan tahunan keuangan Bumdes (15%) . Cara hitung: Jumlah desa yang melaporkan laporan tahunan keuangan/ jumlah semua desa di kec)
---	--	--	--	-----	----	----	----	----	----	----	---

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELIN E 2024	TARGET TAHUNAN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Indeks Kualitas Kinerja Desa	n/a	82,63	85,11	87,59	90,07	92,55	95,03	Aspek Indikator Penilaian Bobot Kualitas Pelayanan 1. Kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi (KTP, KK, dll.) 35% 2. Pengelolaan Keuangan. Laporan keuangan tepat waktu dan transparansi anggaran 15% 3. Partisipasi Masyarakat: Jumlah partisipasi masyarakat dalam musyawarah kelurahan 15% 4. Inovasi Pembangunan: Program pengentasan kemiskinan atau pengelolaan sampah 10% 5. Kualitas Aparatur: Pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur kelurahan 10% 6. Pengelolaan Lingkungan: Keberhasilan dalam program penghijauan atau kebersihan 15%

Sumber: hasil analisis, 2025

3.2 Strategi Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Loa Janan Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang konferhensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Loa Janan yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Tabel 3.2

Strategi Renstra Kecamatan Kecamatan Loa Janan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kewilayahan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi di kecamatan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan

Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional,

regional, dan kabupaten, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Loa Janan sangat penting untuk menunjukkan di mana sub kegiatan akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah.

Secara geografis, beberapa kecamatan di Kutai Kartanegara seperti Loa Janan dan Loa Janan Barat telah diposisikan sebagai daerah mitra utama IKN. Kedua wilayah ini memiliki keunggulan strategis karena kedekatannya dengan kawasan inti IKN sekaligus akses langsung ke jalur konektivitas menuju Balikpapan dan Samarinda.

Arah kebijakan pembangunan di kawasan ini menitikberatkan pada pembentukan pusat layanan publik, pengembangan kawasan permukiman terintegrasi, serta peningkatan peran sebagai hub logistik dan transportasi. Selain itu, Loa Janan dan Loa Janan Barat juga diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi hijau, pariwisata, dan hilirisasi pertanian, sehingga mampu berperan ganda: mendukung kebutuhan langsung IKN sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

Dengan demikian, peran Kutai Kartanegara sebagai daerah transisi IKN tidak hanya sebatas penyedia layanan publik, tetapi juga sebagai mitra pembangunan strategis yang memastikan keberlanjutan

ekosistem ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penetapan Loa Janan dan Loa Janan Barat sebagai bagian dari kawasan mitra IKN menjadi tonggak penting dalam mengintegrasikan pembangunan daerah dengan agenda nasional, sehingga Kutai Kartanegara dapat mengambil manfaat maksimal dari keberadaan IKN, baik dalam bentuk peningkatan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, maupun diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal.

Daerah Transisi IKN ditetapkan sebagai zona transisi Ibu Kota Negara (IKN) dengan fungsi sebagai penyangga strategis.

- Peningkatan infrastruktur dasar dan transportasi.
- Penataan ruang permukiman yang adaptif terhadap kebutuhan IKN.
- Pengembangan kawasan strategis sebagai daerah penopang pertumbuhan ekonomi baru.

Dalam pelaksanaan strategi pembangunan di kecamatan, perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Loa Janan. Penahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Penahapan Renstra PD

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
1	2	3	4	5
Pemenuhan fondasi infrastruktur wilayah dan penataan kelembagaan	Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan	Peningkatan kemanfaatan transformasi pembangunan di Wilayah Kecamatan	Perwujudan fondasi transformasi di Wilayah Kecamatan dalam KUKAR IDAMAN TERBAIK	Pemantapan Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan di Wilayah Kecamatan

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
1	2	3	4	5
Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Pengembangan potensi ekonomi unggulan daerah serta penguatan kelembagaan pelaku usaha berbasis masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing lokal.	Penguatan ekosistem kewirausahaan berbasis inovasi dan pemanfaatan potensi lokal sebagai motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Perwujudan transformasi produk unggulan berbasis ekonomi hijau sebagai upaya peningkatan nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan pembangunan daerah	Penguatan rantai nilai dan akselerasi hilirisasi komoditas unggulan daerah yang ramah lingkungan guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan
Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah	Pengembangan aksesibilitas wilayah dan fasilitas publik berwawasan lingkungan untuk mendukung pemerataan pembangunan.	Pengembangan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Perwujudan sistem infrastruktur aksesibilitas dan mobilitas yang modern, dan terhubung	Penerapan Integrasi jaringan infrastruktur antarwilayah yang menunjang konektivitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan wilayah
Penguatan regulasi dan tata kelola serta infrastruktur digitalisasi pelayanan publik yang adaptif, konsisten dan implementatif	Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah	Penerapan Digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	Perwujudan tata kelola dan sistem evaluasi pembangunan yang adaptif, konsisten, serta implementatif sebagai instrumen peningkatan kinerja	Penguatan kolaborasi multipihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam tata kelola pembangunan

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
1	2	3	4	5
			pembangunan.	
Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas	Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat	Penerapan Integrasi kebijakan adaptasi perubahan iklim dan mitigasi risiko bencana ke dalam seluruh sektor pembangunan	Pengendalian pencemaran serta optimalisasi kualitas daya dukung lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Penguatan energi terbarukan dan akselerasi pengurangan emisi karbon untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan

Sumber: hasil analisis, 2025

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Loa Janan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan Pembangunan setiap tahun di masing-masing

tahap. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Loajan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Pelayanan Yang Prima	Digitalisasi layanan publik	Implementasi Standar Pelayanan Dan Digitalisasi Pelayanan Di Tingkat Kecamatan	Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2	Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Perizinan	Penguatan sistem pengaduan	Meningkatkan Koodinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
3	Pembinaan Dan Pengawasan Administrasi Desa dan Kelurahan	Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
4	Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Tata kelola adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pentahapan	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Menyesuaikan Dengan Pelimpahan Urusan Dari Bupati
5	Peningkatan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dilakukan Melalui Monitoring Dan Laporan Realisasi pada Desa
6			Meningkatkan Pemberdayaan Kelurahan	Dilakukan Melalui Monitoring Dan Laporan Realisasi pada Kelurahan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
7			Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
8			Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
9			Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
10			Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

Sumber: hasil analisis, 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kecamatan Loa Janan ditentukanlah program, kegiatan, dan sub kegiatan kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Loa Janan adalah sebagai berikut:

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan merupakan Program untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk

mengembangkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Program ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik, serta melibatkan pemerintah desa dan kelurahan dalam prosesnya.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program pemerintah daerah untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan teratur di masyarakat, melalui koordinasi berbagai pihak terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi lainnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman dan aman, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ini, diharapkan tercipta lingkungan yang kondusif, aman, dan tertib, sehingga masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan sejahtera.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum merupakan program yang bertujuan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan tidak termasuk dalam urusan yang menjadi kewenangan daerah atau instansi vertikal. Program ini mencakup berbagai aspek, seperti pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, serta koordinasi antar instansi dalam menyelesaikan permasalahan di daerah. Program ini berfokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan kepentingan nasional, seperti pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, serta koordinasi antar instansi untuk menjaga stabilitas dan keamanan daerah

f. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan

pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa.

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Loa Janan adalah sebagai berikut:

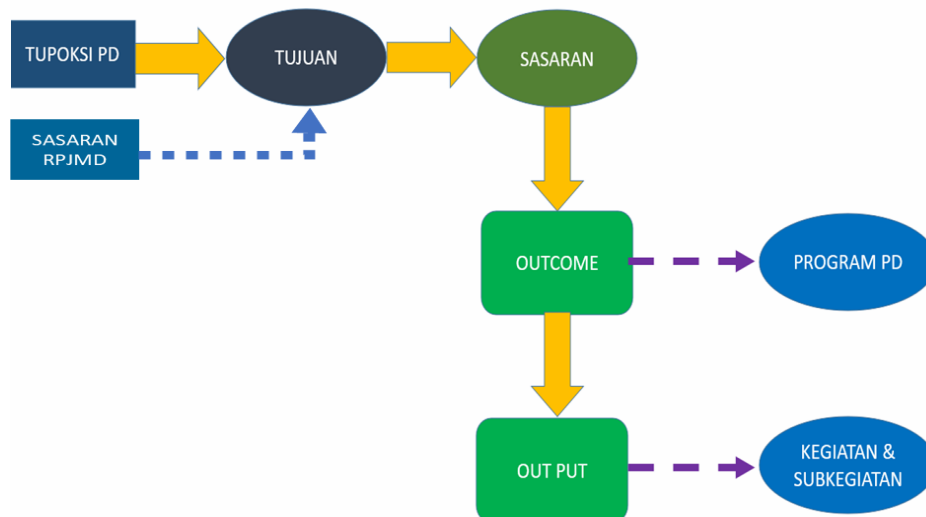
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
11. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
12. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
13. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
14. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;

15. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
16. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
17. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan.

Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Loa Janan merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Loa Janan serta tersebut dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Gambar 4.2



Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
NSPK : 1.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan	Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan				Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan		
		Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan			Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP		
					Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik		
					Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Masyarakat di Kelurahan; 4.Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Infrastruktur Skala Kecil; 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).			Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien		Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program
				<i>Terselesaikannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Sub Kegiatan
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sub Kegiatan
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan
SASARAN RPJMD : Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan
				<i>Terselesikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sub Kegiatan
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Kegiatan
				<i>Terselesiakannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan</i>	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan
				<i>Terselesaikannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>Terselesaikan-nya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan
				<i>Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
				<i>Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah</i>	<i>Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan
				<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program
			Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan		Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan		
				<i>Terlaksananya kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif</i>	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Kegiatan</i>
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sub Kegiatan
				<i>Terlaksannnya kegiatan Urusan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>Kegiatan</i>
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan
				<i>Terlaksannnya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat</i>	<i>Jumlah kegiatan pelimpahan kewenangan Camat yang dilaksanakan</i>	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Kegiatan</i>
				Terlaksannnya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sub Kegiatan
			Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program
				<i>Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Desa</i>	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Kegiatan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan
				<i>Terselenggaranya koordinasi kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kelurahan</i>	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Sub Kegiatan
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	Sub Kegiatan
				<i>Terlaksananya pemberdayaan lembaga di tingkat kecamatan</i>	<i>Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan</i>	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	Kegiatan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Sub Kegiatan
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Sub Kegiatan
			Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Program
				<i>Terlaksananya kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien</i>	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Kegiatan
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Sub Kegiatan
			Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan n Urusan Pemerintahan Umum		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program
				<i>Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan Kecamatan</i>	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Kegiatan
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa		Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program
				<i>Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Desa yang dibina dan diawasi</i>	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Kegiatan
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Sub Kegiatan

4.1.1 PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan dibawah ini:

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01 - KECAMATAN				26.392. 635.977 ,00		49.982. 304.535 ,84		51.519. 931.739 ,02		54.855.6 62.039,3 2		57.502.661 .712,17
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/K OTA				6.365.9 87.977, 00		6.323.9 27.976, 84		7.765.9 87.977, 00		7.770.98 7.977,00		7.770.987. 977,00
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraa n	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	59,7 8	60, 75	6.365.9 87.977, 00	64, 37	6.323.9 27.976, 84	66, 03	7.765.9 87.977, 00	68, 07	7.770.98 7.977,00	70, 37	7.770.987. 977,00

pemerintahan kecamatan (Loa Janan)												
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	2										

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)							
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2	2	2	2	2	2	2
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2	2	2	2	2
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1				1	1	

Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)							
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1						
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	12	12	12	12	12	12	12

	Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)											
7.01.01.2.01.001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00
7.01.01.2.01.002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1		0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)											
7.01.01.2.01.003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0,00		5.000.000,00		5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
7.01.01.2.01.006 - Koordinasi dan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00
7.01.01.2.01.007 - Evaluasi Kinerja				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00

Perangkat Daerah												
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2		0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
7.01.01.2.01.009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				250.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2	2	250.000.000,00	2	235.000.000,00	2	235.000.000,00	2	240.000.000,00	2	240.000.000,00

7.01.01.2.01.0 010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.970.5 73.023, 00		4.970.5 73.022, 84		4.970.5 73.023, 00		4.970.57 3.023,00		4.970.573. 023,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			4.970.5 73.023, 00		4.970.5 73.022, 84		4.970.5 73.023, 00		4.970.57 3.023,00		4.970.573. 023,00

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	1	1	1
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semeste	12	12	12	12	12	12

	ran SKPD (Laporan)											
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	456	720		720		720		720		720	
7.01.01.2.02.0 001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.865.5 73.023, 00		4.865.5 73.022, 84		4.865.5 73.023, 00		4.865.57 3.023,00		4.865.573. 023,00
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	456	720	4.865.5 73.023, 00	720	4.865.5 73.022, 84	720	4.865.5 73.023, 00	720	4.865.57 3.023,00	720	4.865.573. 023,00
7.01.01.2.02.0 005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan				25.000. 000,00		20.000. 000,00		20.000. 000,00		20.000.0 00,00		20.000.000 ,00

Akhir Tahun SKPD												
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00
7.01.01.2.02.007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00
7.01.01.2.02.008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis			0		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00

Prognosis Realisasi Anggaran	Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)											
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				102.060.000,00		60.000.000,00		102.060.000,00		102.060.000,00		102.060.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			102.060.000,00		60.000.000,00		102.060.000,00		102.060.000,00		102.060.000,00
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)											

	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	6		6		6		6		6	
7.01.01.2.03.001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik			0		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00

	Daerah SKPD (Dokumen)											
7.01.01.2.03.0 002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000. 000,00		25.000. 000,00		40.000. 000,00		40.000.0 00,00		40.000.000 ,00
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	50.000. 000,00	1	25.000. 000,00	1	40.000. 000,00	1	40.000.0 00,00	1	40.000.000 ,00
7.01.01.2.03.0 003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.00 0,00		5.000.000, 00
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian			0		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.00 0,00		5.000.000, 00

Barang Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)											
7.01.01.2.03.005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				52.060.000,00		25.000.000,00		52.060.000,00		52.060.000,00		52.060.000,00
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	6	52.060.000,00	6	25.000.000,00	6	52.060.000,00	6	52.060.000,00	6	52.060.000,00
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				214.648.240,00		214.648.240,00		214.648.240,00		214.648.240,00		214.648.240,00

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	214.648.240,00	1	214.648.240,00	1	214.648.240,00	1	214.648.240,00	1	214.648.240,00
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)											
	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	150		150		150		150		150	

	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)											

7.01.01.2.06.001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor				7.997.7 00,00		7.997.7 00,00		7.997.7 00,00		7.997.70 0,00		7.997.700, 00
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	7.997.7 00,00	1	7.997.7 00,00	1	7.997.7 00,00	1	7.997.70 0,00	1	7.997.700, 00
7.01.01.2.06.002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000. 000,00		40.000. 000,00		40.000. 000,00		40.000.0 00,00		40.000.000 ,00
Tersedianya Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1	1	40.000. 000,00	1	40.000. 000,00	1	40.000. 000,00	1	40.000.0 00,00	1	40.000.000 ,00

Perlengkapan Kantor	Kantor yang Disediakan (Paket)											
7.01.01.2.06.003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			0		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
7.01.01.2.06.004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				88.060.000,00		88.060.000,00		88.060.000,00		88.060.000,00		88.060.000,00
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	88.060.000,00	1	88.060.000,00	1	88.060.000,00	1	88.060.000,00	1	88.060.000,00
7.01.01.2.06.005 - Penyediaan				5.560.540,00		5.560.540,00		5.560.540,00		5.560.540,00		5.560.540,00

Barang Cetak dan Penggandaan												
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	5.560.540,00	1	5.560.540,00	1	5.560.540,00	1	5.560.540,00	1	5.560.540,00
7.01.01.2.06.008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				0		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)			0		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
7.01.01.2.06.009 - Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00

Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	150	50.000.000,00	150	40.000.000,00	150	40.000.000,00	150	40.000.000,00	150	40.000.000,00
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				23.030.000,00		23.030.000,00		23.030.000,00		23.030.000,00		23.030.000,00
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	23.030.000,00	1	23.030.000,00	1	23.030.000,00	1	23.030.000,00	1	23.030.000,00
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		0,00		1.400.000.000,00		1.400.000.000,00		1.400.000.000,00

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	30	1.400.0 00.000, 00	30	1.400.00 0.000,00	30	1.400.000. 000,00
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		0		100		100		100	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		6		6		6	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0		0		1		1		1	

	yang Disediakan (Unit)											
7.01.01.2.07.001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		240.000 .000,00		240.000. 000,00		240.000.00 0,00
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	6	240.000 .000,00	6	240.000. 000,00	6	240.000.00 0,00
7.01.01.2.07.002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		450.000 .000,00		450.000. 000,00		450.000.00 0,00

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00
7.01.01.2.07.005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00
7.01.01.2.07.011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	30	360.000.000,00	30	360.000.000,00	30	360.000.000,00
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				423.255.000,00		423.255.000,00		423.255.000,00		423.255.000,00		423.255.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	423.255.000,00	12	423.255.000,00	12	423.255.000,00	12	423.255.000,00	12	423.255.000,00

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12	
7.01.01.2.08.0 002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				205.785 .000,00		205.785 .000,00		205.785 .000,00		205.785. 000,00		205.785.00 0,00

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	205.785 .000,00	12	205.785 .000,00	12	205.785 .000,00	12	205.785. 000,00	12	205.785.00 0,00
7.01.01.2.08.0 003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.350. 000,00		10.350. 000,00		10.350. 000,00		10.350.0 00,00		10.350.000 ,00
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	10.350. 000,00	12	10.350. 000,00	12	10.350. 000,00	12	10.350.0 00,00	12	10.350.000 ,00

7.01.01.2.08.004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				207.120 .000,00		207.120 .000,00		207.120 .000,00		207.120. 000,00		207.120.00 0,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	207.120 .000,00	12	207.120 .000,00	12	207.120 .000,00	12	207.120. 000,00	12	207.120.00 0,00
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				335.451 .714,00		335.451 .714,00		335.451 .714,00		335.451. 714,00		335.451.71 4,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8	10	335.451 .714,00	10	335.451 .714,00	10	335.451 .714,00	10	335.451. 714,00	10	335.451.71 4,00

Pemerintahan Daerah	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)											
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	10		10		10		10		10	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	1	10		10		10		10		10	
7.01.01.2.09.001 - Penyediaan Jasa				51.250.000,00		51.250.000,00		51.250.000,00		51.250.000,00		51.250.000,00

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	10	51.250. 000,00	10	51.250. 000,00	10	51.250. 000,00	10	51.250.0 00,00	10	51.250.000 ,00
7.01.01.2.09.0 002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan				51.250. 000,00		51.250. 000,00		51.250. 000,00		51.250.0 00,00		51.250.000 ,00

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	10	51.250.000,00	10	51.250.000,00	10	51.250.000,00	10	51.250.000,00	10	51.250.000,00
7.01.01.2.09.010 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				232.951.714,00		232.951.714,00		232.951.714,00		232.951.714,00		232.951.714,00

Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	1	10	232.951.714,00	10	232.951.714,00	10	232.951.714,00	10	232.951.714,00	10	232.951.714,00	10	232.951.714,00
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK				19.155.648.000,00		13.017.376.559,00		13.032.943.762,02		16.363.674.062,32		19.010.673.735,17		
Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Loa Janan)				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		

7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00
Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	0	2		2		2		2		2	

	Instansi Vertikal Terkait (Laporan)											
7.01.02.2.01.001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	0	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00

Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)											
7.01.02.2.01.002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00

yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan												
Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00
7.01.02.2.02.003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00

Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Loa Janan)				18.655.648.000,00		12.517.376.559,00		12.532.943.762,02		15.863.674.062,32		18.510.673.735,17
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				18.655.648.000,00		12.517.376.559,00		12.532.943.762,02		15.863.674.062,32		18.510.673.735,17

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12	18.655. 648.000 ,00	12	12.517. 376.559 ,00	12	12.532. 943.762 ,02	12	15.863.6 74.062,3 2	12	18.510.673 .735,17
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	173	37		37		37		37		37	
7.01.02.2.04.0 002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				855.648 .000,00		511.542 .949,84		511.542 .949,68		611.542. 949,68		711.542.94 9,68
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan	12	12	855.648 .000,00	12	511.542 .949,84	12	511.542 .949,68	12	611.542. 949,68	12	711.542.94 9,68

dengan Nonperizinan	Pemerintahan (Laporan)											
7.01.02.2.04.003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				17.800.000.000,00		12.005.833.609,16		12.021.400.812,34		15.252.131.112,64		17.799.130.785,49
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	173	37	17.800.000.000,00	37	12.005.833.609,16	37	12.021.400.812,34	37	15.252.131.112,64	37	17.799.130.785,49
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				436.000.000,00		30.286.000.000,00		30.286.000.000,00		30.286.000.000,00		30.286.000.000,00

Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Loa Janan)				436.000.000,00		30.286.000.000,00		30.286.000.000,00		30.286.000.000,00		30.286.000.000,00
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	2	2		2		2		2		2	

	Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)											
7.01.03.2.01.001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00

	di Desa (Lembaga Kemasyarakata n)											
7.01.03.2.01.0 003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				50.000. 000,00		50.000. 000,00		50.000. 000,00		50.000.0 00,00		50.000.000 ,00
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	50.000. 000,00	2	50.000. 000,00	2	50.000. 000,00	2	50.000.0 00,00	2	50.000.000 ,00
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata				336.000 .000,00		30.186. 000.000 ,00		30.186. 000.000 ,00		30.186.0 00.000,0 0		30.186.000 .000,00

n Tingkat Kecamatan												
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	207	207	336.000.000,00	342	30.186.000.000,00	342	30.186.000.000,00	342	30.186.000.000,00	342	30.186.000.000,00
7.01.03.2.03.001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				336.000.000,00		30.186.000.000,00		30.186.000.000,00		30.186.000.000,00		30.186.000.000,00
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	207	207	336.000.000,00	342	30.186.000.000,00	342	30.186.000.000,00	342	30.186.000.000,00	342	30.186.000.000,00
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI				165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Loa Janan)				165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	2	2	165.000.000,00	2	165.000.000,00	2	165.000.000,00	2	165.000.000,00	2	165.000.000,00

	Masyarakat (Laporan)											
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
7.01.04.2.01.0 001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,				40.000. 000,00		40.000. 000,00		40.000. 000,00		40.000.0 00,00		40.000.000 ,00

Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00
7.01.04.2.01.002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh				125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00

Agama dan Tokoh Masyarakat												
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	2	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195.000.000,00		115.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Loa Janan)				195.000.000,00		115.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				195.000 .000,00		115.000 .000,00		195.000 .000,00		195.000. 000,00		195.000.00 0,00
Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1	195.000 .000,00	1	115.000 .000,00	1	195.000 .000,00	1	195.000. 000,00	1	195.000.00 0,00
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	1.30 0	1.6 00		1.6 00		1.6 00		1.6 00		1.6 00	

	Regional, dan Nasional (Orang)											
7.01.05.2.01.004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				180.000.000,00		100.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku	1.300	1.600	180.000.000,00	1.600	100.000.000,00	1.600	180.000.000,00	1.600	180.000.000,00	1.600	180.000.000,00

Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)											
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00

7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				75.000. 000,00		75.000. 000,00		75.000. 000,00		75.000.0 00,00		75.000.000 ,00
Meningkatnya kinerja penyelenggaraa n pemerintahan desa (Loa Janan)				75.000. 000,00		75.000. 000,00		75.000. 000,00		75.000.0 00,00		75.000.000 ,00
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				75.000. 000,00		75.000. 000,00		75.000. 000,00		75.000.0 00,00		75.000.000 ,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di	8	9	75.000. 000,00	9	75.000. 000,00	9	75.000. 000,00	9	75.000.0 00,00	9	75.000.000 ,00

Pemerintahan Desa	Wilayahnya (Laporan)											
7.01.06.2.01.0 017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				75.000. 000,00		75.000. 000,00		75.000. 000,00		75.000.0 00,00		75.000.000 ,00
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	8	9	75.000. 000,00	9	75.000. 000,00	9	75.000. 000,00	9	75.000.0 00,00	9	75.000.000 ,00

4.2 Sub Kegiatan Prioritas

Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dari teknik cascading (penurunan kinerja). Dan merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program RT Ku-Terbaik	Penyaluran Program RT di Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
2	Program Pelayanan Publik Cerdas	Mini Mall Pelayanan Publik di Kecamatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	

4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Target keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan, terukur, dan

selaras dengan mandat kewenangan serta arah kebijakan pembangunan daerah. IKU menjadi alat ukur strategis yang digunakan untuk menilai sejauh mana capaian program dan kegiatan mendukung realisasi tujuan jangka menengah dinas. Penetapan IKU memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektivitas, serta kontribusi langsung terhadap pelayanan publik di Kecamatan. Dengan demikian, keberadaan IKU dalam dokumen Renstra ini diharapkan mampu menjadi dasar pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja secara sistematis dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Loa Janan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Loa Janan

INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUNAN						KET
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	5	6	7	8	9	10	11	12
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	n/a	3,66	3,67	3,68	3,69	3,70	3,71	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kecamatan berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.
Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Pelayanan yang sesuai SOP dibagi total jumlah Pelayanan dikali 100

INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUNAN						KET
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan yang tertib dan Baik	n/a	78	81	84	87	90	91	Jumlah Desa yang tertib administrasi dan keuangan Penilaian Keuangan: 1. Pengesahan APBDes per 31 Des di aplikasi siskuedes web (20%) Cara hitung: (jumlah desa tepat waktu / jumlah desa di kecamatan). 2. Desa yang optimal menggunakan aplikasi ATKPDdes secara 100% (15%) Cara Hitung:Jumlah desa yang optimal menggunakan aplikasi/jumlah desa dikec 3. Persentasi realisasi anggaran (20%) Cara Hitung: jumlah anggaran yang terlaksana 100% / jumlah anggaran desa Penilaian Administrasi: 1. Penyampaian Perdes LPPDes, Perdes Pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya dan laporan keterangan kades akhir 31 Maret (10%) cara Hitung: jumlah desa yang menyampaikan di akhir 31 maret/ jumlah desa di kec 2. Penyampaian laporan kinerja BPD per 31 April (10%) Cara Hitung: Jumlah Desa yang menyampaikan laporan per 31 april/jumlah desa 3. Pengisian Prosdekel dan Sdgs (10%) cara hitung: Jumlah desa yang melakukan pengisian prodeskel dan SDGS/jumlah semua desa 4. Laporan tahunan keuangan Bumdes (15%) . Cara hitung: Jumlah desa yang melaporkan laporan tahunan keuangan/ jumlah semua desa di kec)

INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUNAN						KET
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	5	6	7	8	9	10	11	12
Indeks Kualitas Kinerja Desa	n/a	82,63	85,11	87,59	90,07	92,55	95,03	Aspek Indikator Penilaian Bobot Kualitas Pelayanan 1. Kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi (KTP, KK, dll.) 35% 2. Pengelolaan Keuangan. Laporan keuangan tepat waktu dan transparansi anggaran 15% 3. Partisipasi Masyarakat: Jumlah partisipasi masyarakat dalam musyawarah kelurahan 15% 4. Inovasi Pembangunan: Program pengentasan kemiskinan atau pengelolaan sampah 10% 5. Kualitas Aparatur: Pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur kelurahan 10% 6. Pengelolaan Lingkungan: Keberhasilan dalam program penghijauan atau kebersihan 15%

Sumber : analisis Kecamatan Loa Janan

BAB V

PENUTUP

Kecamatan Loa Janan, dengan luas wilayah mencapai 284,925201 km² dan populasi sebanyak 37.390 jiwa (data 2024), menghadapi tantangan besar dalam pembangunan wilayahnya. Potensi sumber daya alam, posisi strategis di pesisir selatan, serta kedekatan dengan IKN Nusantara menawarkan peluang signifikan untuk pengembangan ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik. Namun, tantangan berupa tekanan terhadap lingkungan, infrastruktur yang belum memadai, serta masalah sosial-ekonomi membutuhkan pendekatan yang holistik dan berbasis data.

Rencana Strategis Kecamatan Loa Janan untuk periode 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan layanan masyarakat di wilayah Kecamatan Loa Janan. Rencana ini menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan lima tahun kedepan, yang dilengkapi dengan strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Dengan demikian, dokumen ini memuat perencanaan yang bersifat operasional. Rencana ini diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029.

Sebagai wilayah yang strategis dan dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kecamatan Loa Janan dihadapkan pada berbagai peluang dan tantangan besar. Dokumen ini dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dengan cara yang terarah, efektif, dan terukur. Dengan mempertimbangkan kondisi

terkini serta proyeksi masa depan, pelaksanaan kaidah berikut menjadi pedoman untuk Renstra Kecamatan Loa Janan Tahun 2025-2029:

1. Renstra Perangkat Daerah menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Rancangan Renstra ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Loa Janan setiap tahunnya. Penyusunan Renja akan tetap merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Camat melaksanakan Evaluasi Hasil Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi hasil Renstra Perangkat daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan menggunakan data hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah. Hasil Evaluasi Renstra Perangkat Daerah dilaporkan kepada Bupati melalui Bappeda.
3. Sinkronisasi dengan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara
Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Loa Janan (RKA-Kecamatan Loa Janan) disusun berdasarkan pedoman Renja Kecamatan Loa Janan, untuk mendukung penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini menjamin bahwa alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan kecamatan.
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Renstra PD
Pelaksanaan Renstra Kecamatan Loa Janan 2025-2029, yang dijabarkan dalam Renja Perangkat daerah, akan dipertanggungjawabkan secara sistematis dan terstruktur. Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dalam bentuk Lapiran Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Laporan Evaluasi Hasil Renstra Perangkat Daerah, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

5. Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan, sesuai dengan tata cara yang diatur oleh Pemerintah.

Demikian, dokumen Rencana Strategis Kecamatan Loa Janan 2025-2029 ini disusun sebagai panduan strategis untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, demi mewujudkan Kecamatan Loa Janan yang lebih maju dan sejahtera. Kerjasama antara pemerintah kecamatan, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan Renstra ini.

Loa Janan, 23 Januari 2026
Camat

Drs. Hery Rusnadi
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 197212131992011001